

**OPINI KOMUNITAS GENPI SUMATERA UTARA
TERHADAP PEMBERITAAN WACANA PENERAPAN
WISATA HALAL DI OBJEK WISATA DANAU TOBA**

SKRIPSI

Oleh :

AULIA RAMADHANA

NPM : 1703110132

**Konsentrasi Hubungan Masyarakat
Program Studi Ilmu Komunikasi**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

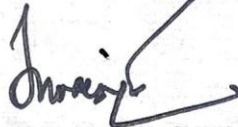
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **AULIA RAMADHANA**
N P M : 1703110132
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : **OPINI KOMUNITAS GENPI SUMATERA UTARA
TERHADAP PEMBERITAAN WACANA PENERAPAN
WISATA HALAL DI OBJEK WISATA DANAU TOBA**

Medan, 10 September 2021

PEMBIMBING



Dr. IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos., M.A.P.

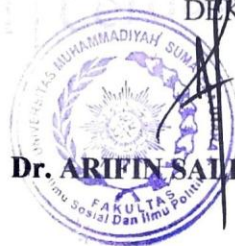
Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI



AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.S.P.

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : AULIA RAMADHANA
NPM : 1703110132
Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
Pada hari, tanggal : Rabu, 08 September 2021
Waktu : Pukul 08:00 WIB s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom.

PENGUJI II : JUNAIDI, S.Pd.I., M.Si.

PENGUJI III : Dr. IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos., M.A.P.

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.S.P. Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.



PERNYATAAN



Dengan ini saya, Aulia Ramadhana, NPM 1703110132, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 07 September 2021

Yang menyatakan,



Aulia Ramadhana

KATA PENGANTAR



Pertama-tama marilah panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah *subhanallahu ta'ala*. Karena dengan rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Opini Komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap Pemberitaan Wacana Penerapan Wisata Halal di Objek Wisata Danau Toba**”. Kemudian salawat serta salam tak lupa senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad *sallallahu'alaihi wassalam*. Yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang penuh dengan cahaya islam, keimanan, dan cinta kasih terhadap sesama umat.

Penulisan skripsi ini alhamdulillah telah terselesaikan setelah melewati berbagai kegiatan, baik itu seminar proposal skripsi, penelitian, dan beberapa tahapan bimbingan. Penulis banyak sekali mendapatkan saran, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Kepada Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faizal Hamzah Lubis, S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos., M.I.Kom selaku eks Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Teristimewa sekali kepada Bapak Dr. Irwan Syari Tanjung, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam penyelesaian laporan skripsi ini.
9. Seluruh jajaran Bapak/Ibu Dosen yang telah berjasa dalam perkuliahan dan memberikan ilmu yang insyaallah berkah serta jajaran karyawan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam memenuhi kelengkapan berkas-berkas dan informasi.
10. Kepada Sdr. Edi Purnomo selaku Koordinator Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara.
11. Sdr. Ricky Febriansyah selaku Ketua Harian Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara.
12. Sdr. Fit Hartoyo selaku Humas Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara dan Sdr. Fachri Maulana sebagai Ketua Divisi *Creative and Content* Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara.
13. Kepada Sdri. Clara, Sdr. Ardiansyah Makrif, Sdri. Aurelly Oxa, dan Sdr. Junius Ivan Buci sebagai anggota Komunitas Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara.
14. Dan tak lupa kepada orang tua tercinta dan seluruh anggota keluarga serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberi motivasi, masukan, dan wejangan berharga.

Penulisan laporan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat berguna bagi penyusunan dan penyempurnaan selanjutnya. Dengan adanya laporan skripsi ini diharapkan dapat memberi acuan informasi dan pengetahuan serta menjadi dedikasi keilmuan penulis yang sudah diemban selama kurang lebih empat tahun di kampus tercinta ini.

Medan, 22 Juni 2021

Penulis

Aulia Ramadhana
NPM 1703110132

**OPINI KOMUNITAS GENPI SUMATERA UTARA TERHADAP
PEMBERITAAN WACANA PENERAPAN WISATA HALAL
DI OBJEK WISATA DANAU TOBA**

**Aulia Ramadhana
1703110132**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap pemberitaan wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam tahapan prapenelitian (observasi awal), penelitian dengan wawancara mendalam (*indept interview*), dan pascapenelitian dengan *rechecking* atau pembuktian data dan dokumentasi. Model analisis data deskriptif dalam penelitian ini dijalankan dengan asas model analisis interaktif dengan tujuan menggali ketuntasan masalah hingga jenuh. Informan atau narasumber yang ditetapkan berjumlah tujuh anggota komunitas GenPI Sumatera Utara. Teknik pengampilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan informasi yang diberikan informan yang terpilih cukup membantu dan bisa mempresentasikan masalah yang sedang diteliti. Simpulan yang diperoleh terhadap opini komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap pemberitaan wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba dinyatakan tidak benar dan dipelintir. Ada pihak wartawan yang tidak menangkap maksud dari pernyataan Gubernur Sumatera Utara sehingga terjadi salah persepsi dan menimbulkan penolakan atau aksi massa di masyarakat.

Kata Kunci: Opini, GenPI Sumut, Pemberitaan, Wisata Halal, Danau Toba.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II URAIAN TEORITIS	11
2.1 Konsep Teoritis	11
2.1.1 Pengertian Komunikasi	11
2.1.2 Pengertian Opini Publik	16
2.1.3 Ideologi Media Massa	20
2.1.4 Pemberitaan.....	22
2.1.5 Pengertian Komunitas	23
2.1.6 Pengertian Pariwisata	25
2.1.7 Pengertian Wisata Halal.....	27
2.1.8 Pengertian Wisata Syariah	29
2.1.9 Konsep dan Kebijakan Pariwisata di Indonesia dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara	32
2.1.10 Pengertian Demonstrasi dan Asasnya	33

2.1.11 Tingkatan Sikap	35
2.1.12 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap	36
2.2. Penelitian yang Relevan	37
2.3 Anggapan Dasar	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Kerangka Konsep	42
3.3 Definisi Konsep	43
3.4 Kategorisasi	44
3.5 Informan/Narasumber	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data	48
3.7 Teknik Analisis Data	52
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	54
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	54
3.9.1 Sekilas tentang Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara	55
3.9.2 Struktur Organisasi Kepengurusan Generasi Pesona Indonesia Sumatera Utara (GenPI Sumut) Masa Jabatan 2021-2023	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Hasil Penelitian	57
4.2 Pembahasan	74
4.2.1 Kilas Balik Wisata Halal	74
4.2.2 Wacana Implementasi Wisata Halal	74
4.2.3 Pemberitaan Wacana Penerapan Wisata Halal oleh Gubernur Sumatera Utara	75
4.2.4 Aksi Demonstrasi Penolakan Wisata Halal	78

BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Simpulan	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Definisi Operasional dan Indikator Variabel	44
Tabel 3.2	Daftar Identitas Responden Penelitian	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Logo GenPI Sumatera Utara	56
Gambar 4.1	Berita Klarifikasi Gubernur Sumatera Utara.....	76
Gambar 4.2	Klarifikasi Kominfo terkait Isu Wisata Syariah di Danau Toba	76
Gambar 4.3	Berita Aksi Penolakan Wisata Halal oleh Mahasiswa	78
Gambar 5	Dokumentasi bersama Ketua Harian GenPI Sumut, Sdr. Ricky Febriansyah	93
Gambar 6	Dokumentasi bersama Humas GenPI Sumut, Sdr. Fit Hartoyo	93
Gambar 7	Dokumentasi bersama Ketua Divisi <i>Creative and Content</i> GenPI Sumut, Sdr. Fachri Maulana	93
Gambar 8	Dokumentasi bersama Anggota Divisi <i>Offline</i> GenPI Sumut, Sdri. Clara.....	93
Gambar 9	Dokumentasi bersama Anggota Divisi <i>Offline</i> GenPI Sumut Sdr. Ardiansyah Makrif.....	94
Gambar 10	Dokumentasi bersama Anggota Divisi <i>Offline</i> GenPI Sumut, Sdri. Aurelly Ocxa	94
Gambar 11	Dokumentasi bersama Anggota dan Videografer resmi GenPI Sumut, Sdr. Junius Ivan Buci.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mencanangkan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas di 5 (lima) objek wisata yang salah satunya di Danau Toba sehingga turut menjadi konsentrasi pihak pemerintah Sumatera Utara untuk menyukseskan program prioritas ini. Pemerintah daerah mempunyai peran signifikan untuk memajukan daerah dengan melihat berbagai potensi kedaerahan yang dimilikinya. Salah satu potensi kedaerahan yang sangat mungkin dikembangkan ialah sektor pariwisata itu sendiri (Bahrudin 2017; Colina 2016; Kumala, Soelistyo, dan Nuraini 2017; Simamora dan Sinaga 2016).

Diversifikasi sektor pariwisata pun semakin mengalami perkembangan, misalnya mulai semarak apa yang disebut wisata religi (Anam 2017; Annisarizki dan Sucahya 2018; Chotib 2015; Machin dan Khoiruddin 2017) atau wisata halal (Fahham 2017; Maryati 2019; Rimet 2019; Subarkah 2018) yang semakin banyak dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia (Tarigan dan Basit, 2020:125-126).

Berbagai strategi dan wacana dipersiapkan. Namun pada tahun 2019 lalu terjadilah polemik yang disebabkan oleh isu wacana penerapan wisata halal di Danau Toba oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sehingga spontan mengundang reaksi penolakan dari kalangan masyarakat. Seperti halnya pada senin (2/9/2019),

sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur dan muncul pula petisi menolak wisata halal di kawasan Danau Toba berdasarkan informasi yang bersumber dari okezone.com edisi Rabu (4/9/2019).

Memang pada dasarnya masyarakat memiliki pendapat dan cara pandang yang berbeda. Masyarakat bisa dengan bebas melontarkan opini terkait hal yang baginya tidak sesuai atau perlu dikaji kembali. Pembentukan pendapat atau opini dalam hal ini pun sangat tergantung pada proses komunikasi dan *feedback* yang mereka dapat. Masyarakat sekarang dengan mudahnya memperoleh informasi lewat beragam media informasi tentang persoalan yang sedang terjadi di lingkungan mereka. Seperti halnya pemberitaan polemik wacana penerapan konsep wisata halal di objek wisata Danau Toba ini yang banyak menimbulkan pro dan kontra.

Namun Gubernur Sumatera Utara membantah akan isu yang sempat marak diberitakan tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya ada yang suka dramatisir dan memfitnah seperti yang dikutip pada detiknews.com (03/09/2019). Menurut beliau, ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang salah menafsirkan pernyataan beliau sehingga timbul kesalahpahaman yang bisa memicu konflik dan demonstrasi di masyarakat seperti yang telah penulis singgung diawal dari pemberitaan yang bersumber dari okezone.com (4/9/2019), yang langkah ini tidak mendapatkan dukungan penuh dari segolongan masyarakat sehingga sempat terjadi demonstrasi dengan alasan ingin mempertahankan eksistensi budaya Batak agar tidak terkikis dan merasa bahwa masyarakat Danau Toba memang sudah memperlakukan pendatang

atau wisatawan sebagai “tondong” (saudara) atau “dongan” (sahabat). Dan selama ratusan tahun pun, tidak pernah terdengar kesulitan bagi siapapun, agama apapun, suku bangsa apapun, negara manapun untuk dapat menikmati keindahan Danau Toba (Putri, Tiara, 2019).

Di Indonesia sendiri, isu seperti ini masih sangat sensitif. Bukan karena konsep dari wisata halal, melainkan dari salah persepsinya tentang konsep dari wisata halal itu sendiri dan diyakini ada pihak yang justru memperkeruh suasana dengan salah menginterpretasikan konsep wisata halal dengan implementasi wisata halal yang terkesan serba islami. Memang perlu selalu diingat bahwa penerapan konsep wisata halal tentu berbeda dengan penerapan hukum syariah yang selama ini dianggap tidak sependapat dengan beberapa kalangan di negara ini.

Dengan isu intoleransi yang sempat terjadi, salah informasi yang diberitakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut telah mengundang reaksi masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman dan mengkaitkannya dengan isu berat sebelah dan menguntungkan sebelah pihak. Sehingga akhirnya wacana implementasi konsep wisata halal di Danau Toba perlu dikaji ulang atau bahkan ditiadakan oleh pemerintah karena memang ada sebagian kelompok yang sudah terlebih dahulu paranoid ketimbang memahaminya terlebih dahulu sehingga terjadi aksi massa yang menolak untuk diterapkannya wisata halal di Danau Toba.

Masalah ini sangat serius dan perlu solusi terbaik karena ini berhubungan dengan citra pemerintah dan bisa terus memicu perlawanan sengit dari masyarakat tertentu. Masyarakat terus beranggapan bahwa konsep wisata halal ini bisa

menimbulkan stigma baru yang potensial menimbulkan gesekan akan kearifan lokal serta potensi budaya setempat. Padahal nyatanya konsep wisata ini bisa berjalan berdampingan tanpa saling menghilangkan, mengikis, atau bersaing dengan kearifan lokal disana.

Paparan latar belakang tersebut diatas memunculkan pentingnya untuk melakukan penelitian tentang opini komunitas terkait tentang pemberitaan wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana opini komunitas Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara terhadap pemberitaan wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan dari komunitas GenPI Sumatera Utara selaku komunitas resmi yang bergerak di bidang pariwisata daerah terkait pemberitaan wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba.

Namun penelitian tentang Danau Toba yang dikaitkan dengan wisata halal maupun polemik yang terjadi sudah pernah dilakukan. Namun penelitian tentang pembentukan opini publik (dimana aktivis resmi menjadi representasinya) terhadap pemberitaan wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba merupakan sesuatu hal yang baru dan menarik untuk dikaji. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Rose Emmaria Tarigan dan Abdul Basit yang berjudul “Penolakan Publik terhadap Program Wisata Halal Danau Toba” dengan simpulan yang bahwa pada masyarakat Indonesia yang plural, pejabat publik (politisi) dituntut memiliki kompetensi dalam komunikasi politik, terutama kemampuan dalam memahami

khalayak atau konstituennya. Perbedaan latar belakang khalayak menjadikan kompetensi ini sangat penting sehingga komunikator bisa merancang pesan dengan baik dan terhindar dari salah penafsiran. Selain kemampuan memahami (menganalisis) khalayak, aspek lain yang juga penting ialah memiliki bukti dalam presentasi yang diwakili oleh *ethos*, *pathos*, dan *logos* (Tarigan dan Basit, 2020).

Dalam penelitian ini, penting untuk memperhatikan asumsi retorik yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait hakikat opini publik itu sendiri. Seperti contoh menurut Sastropoetro dalam “Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial” (1990:49), istilah opini publik sering digunakan untuk menunjuk kepada pendapat-pendapat kolektif dari sejumlah orang. Berbeda dengan kerumunan, publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, seperti pembicaraan-pembicaraan pribadi yang berantai, melalui desas-desus, melalui surat kabar, radio, televisi dan film. Alat-alat penghubung ini memungkinkan “publik” mempunyai pengikut yang lebih luas dan lebih besar jumlahnya. Publik dapat dimaknai sebagai sejumlah orang yang mempunyai minat, kepentingan, atau kegemaran yang sama.

Pembentukan opini pasti tidak bisa terlepas dari isu yang menjadi masalahnya. Isu menurut definisi dari Coombs dalam bukunya *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding* (2007:23) merupakan salah satu jenis dari masalah yang dapat mempengaruhi organisasi. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang diterima oleh organisasi. Isu-isu yang berkembang di sekitar

organisasi disebabkan oleh perubahan yang terjadi di dalam eksternal dan internal organisasi. Perubahan eksternal misalnya terkait dengan pemerintah (perubahan politik dan ekonomi). Sedangkan, aspek internal misalnya perubahan kebijakan manajemen yang berpengaruh terhadap karyawan. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi dan harapan antara organisasi dan *stakeholders*.

Coombs dalam *Ongoing Crisis Communication* (2007:42) selanjutnya menjelaskan bahwa perbedaan persepsi dan harapan yang dibiarkan berpotensi menimbulkan perlawanan *stakeholders*, salah satunya dengan menyebarkan publikasi negatif tentang organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu mempunyai daya legitimasi ketika isu tersebut menyita perhatian publik. Dan hal tersebutlah yang menjadi bahan kajian penelitian ini untuk mencari kebenaran isu dengan menyamakan persepsi yang didapatkan dari responden nanti.

Adanya sikap pro dan kontra dari masyarakat terkhususnya yang berada di sekitaran Danau Toba membuat peneliti tertarik untuk mengetahui dan menggali lebih dalam tentang wacana penerapan wisata halal dan opini publik terhadap pemberitaan yang menimbulkan pro kontra dan sempat terjadi aksi penolakan atas program tersebut. Kejadian tersebut sangat disayangkan karena terjadi di masa belum lamanya Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menjabat, namun beliau harus dihadapkan dengan tanggapan yang tidak relevan dari masyarakat. Disini opini yang dituju adalah komunitas Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara. Asumsinya para anggota komunitas tersebut dirasa cukup representatif mengingat para informan merupakan para anggota resmi organisasi cetusan Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan diyakini mengetahui seluk beluk kepariwisataan daerah Sumatera Utara. Opini yang ditampung diharapkan dapat dilihat berdasarkan indikator yang berupa *perception*, *attitude* dan *believes* (Abelson dalam Ruslan 2007:66). Indikator *perception* (persepsi) terdiri atas latar belakang budaya yang mereka punya, pengalaman masa lalu, dan nilai yang dianut. Sedangkan indikator *attitude* terdiri atas *cognitive*, *affective*, dan *behaviour*. Sehingga akan membentuk opini publik yang positif, netral, maupun negatif.

Dengan adanya penelitian ini dan dengan hasil yang didapatkan langsung dari informan yang bisa dibilang menjadi penyambung lidah dari pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat menjawab dan membuka mata publik terkait hal yang seharusnya tidak harus dibesar-besarkan bahkan jika dimengerti dasarnya dapat menjadi benteng kemajuan pariwisata daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana opini komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap pemberitaan wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui opini komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap pemberitaan wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan opini publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian serupa yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan opini publik maupun kepariwisataan khususnya wisata halal.
- c. Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, serta lembaga swadaya masyarakat untuk memahami dan peduli terhadap masalah yang memerlukan perhatian masyarakat dan kepariwisataan terkhususnya wisata halal.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan pengetahuan pencarian solusi permasalahan yang dihadapi secara nyata dalam masyarakat.

- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan sosialisasi bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya atas isu pemberitaan yang membuat citra pemerintahan buruk dan ini bisa dijadikan pengambilan keputusan terbaik terkait penerapan konsep wisata halal di objek wisata Danau Toba.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta sosialisasi terhadap polemik wisata halal ini sehingga masyarakat *aware* dan lebih peka akan fakta yang sebenarnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan skripsi ini.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bagian ini akan dikemukakan dengan jelas, ringkas, dan padat secara kritis tentang hasil tinjauan kepustakaan terkait dengan masalah yang akan menjadi bahan penelitian, serta memutuskan anggapan dasar penelitian sebagai simpulan probabilistik atau jawaban sementara akan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan berbagai pendekatan pendukung metode penelitian, seperti jenis penelitian yang digunakan, kerangka konsep, definisi konsep, definisi operasional, populasi dan sampel penelitian, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian, serta juga dijelaskan lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas hasil yang telah diteliti dan pembahasan lebih lanjut seputar hasil penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini akan menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan kesimpulan harus menjawab rumusan masalah penelitian. Pada bagian akhir juga terdapat uraian saran yang menjelaskan tindak seharusnya yang perlu dijalankan serta ungkapan yang perlu disampaikan terkait penyempurnaan laporan penelitian yang telah dibuat.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1 Pengertian Komunikasi

Dalam Riswandi (2009), istilah “komunikasi” (bahasa Inggris “*communication*”) berasal dari Bahasa Latin *communicates*, *communicatio* atau *communicare* yang berarti “berbagi” atau “menjadi milik bersama”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Menurut Webster New Collegiate Dictionary, *communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs, or behavior* (komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku).

Para ahli komunikasi juga memberikan pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing. Dani Vardiansyah (2008:25-26) mengungkapkan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan para ahli:

- a. Carl Hovland, Janis & Kelly menyebutkan bahwa komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan

stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (khalayak).

- b. Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain.
- c. Menurut Gode, komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih.
- d. Menurut Brandlun, komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego.
- e. Resuch mengungkapkan bahwa komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan.
- f. Weaver mengungkapkan, komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya.

Alo Liliweri dalam bukunya “Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya” (2013) mengutip pendapat Walstrom dari berbagai sumber menyebutkan beberapa definisi komunikasi, yaitu:

- a. Komunikasi antarmanusia sering diartikan dengan pernyataan diri yang paling efektif.

- b. Komunikasi merupakan pertukaran pesan-pesan secara tertulis dan lisan melalui percakapan, atau bahkan melalui penggambaran yang imajiner.
- c. Komunikasi merupakan pembagian informasi atau pemberian hiburan melalui kata-kata secara lisan atau tertulis dengan metode lainnya.
- d. Komunikasi merupakan pengalihan informasi dari seorang kepada orang lain.
- e. Pertukaran makna antara individu dengan menggunakan sistem simbol yang sama.
- f. Komunikasi adalah proses pengalihan pesan yang dilakukan seorang melalui suatu saluran tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu.
- g. Komunikasi adalah proses pembagian informasi, gagasan atau perasaan yang tidak saja dilakukan secara lisan dan tertulis melainkan melalui bahasa tubuh, atau gaya atau tampilan pribadi, atau hal lain disekelilingnya yang memperjelas makna.

Selain itu Deddy Mulyana dalam “Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar” (2014) juga memberikan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli antara lain:

- a. Theodore M. Newcomb menyatakan “Komunikasi merupakan setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi,

- terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima.”
- b. Carl I. Hovland, “Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan).”
 - c. Gerald R. Miller, “Komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan suatu penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.”
 - d. Everett M. Rogers, “Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka.”
 - e. Raymond S. Ross, “Komunikasi (internasional) adalah suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator.”
 - f. Mary B. Cassata dan Molefi K. Asante, “Komunikasi adalah transmisi informasi dengan tujuan mempengaruhi khalayak”
 - g. Dan pengertian komunikasi paling populer dari Harold Laswell yang menyatakan, “Cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut *“who says what and in which channel to whom with what effect?”*” atau siapa

yang mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana??"

Penulis bisa menyimpulkan yang bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan-pesan baik itu secara verbal maupun nonverbal dari seorang individu ke individu lain atau kelompok tertentu sehingga individu atau kelompok tersebut paham dan memberikan *feedback* atau balasan. Dalam Ilmu Komunikasi ini sendiri, terdapat jenis komunikasi yang disebut Komunikasi Politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik (Susanto, 1980:2).

Kemudian mengenai komunikasi politik ini, Kantaprawira memfokuskan pada kegunaannya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan (*policy*) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi (Rusadi, 1983:25).

2.1.2 Pengertian Opini Publik

Cutlip & Center (Santoso, 1987:52) menyatakan bahwa opini publik itu merupakan suatu hasil penyatuan dari pendapat individu-individu tentang masalah umum. Sementara itu William Albig (Santoso, 1987:52) menyatakan bahwa opini publik merupakan hasil interaksi antarindividu dalam suatu publik. Pernyataan kedua pakar itu, yang pertama menyatakan bahwa opini publik merupakan hasil penyatuan opini, seolah-olah merupakan jumlah opini-opini, dan yang kedua menyatakan hasil interaksi individu melalui proses pembicaraan, mungkin debat atau tukar pikiran. Maka dapatlah dikatakan bahwa opini publik itu sebenarnya mengandung kesamaan, yaitu terbentuk melalui suatu proses interaksi berupa pembicaraan atau pertukaran pikiran di antara individu-individu yang terlibat dalam kelompok.

Menurut Abelson (Ruslan, 2007:66), opini publik erat kaitannya dengan kepercayaan mengenai sesuatu (*belief*), apa yang sebenarnya dirasakan atau menjadi sikap masyarakat (*attitude*), dan berlandaskan persepsi (*perception*) yang berakar dari beberapa faktor, yaitu latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita-berita atau pendapat yang berkembang dan kemudian mempengaruhi pandangan masyarakat.

Menurut Sastropetro dalam “Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial” (1990:49), istilah opini publik sering digunakan untuk menunjuk kepada pendapat-pendapat kolektif dari sejumlah orang. Berbeda dengan kerumunan, publik lebih merupakan kelompok yang tidak

merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, seperti pembicaraan-pembicaraan pribadi yang berantai, melalui desas-desus, melalui surat kabar, radio, televisi dan film. Alat-alat penghubung ini memungkinkan “publik” mempunyai pengikut yang lebih luas dan lebih besar jumlahnya. Publik dapat dimaknai sebagai sejumlah orang yang mempunyai minat, kepentingan, atau kegemaran yang sama.

Pembentukan opini publik pasti tidak bisa terlepas dari isu yang menjadi masalahnya. Isu menurut definisi dari Coombs dalam bukunya *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding* (2007:23) merupakan salah satu jenis dari masalah yang dapat mempengaruhi organisasi. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang diterima oleh organisasi. Isu-isu yang berkembang di sekitar organisasi disebabkan oleh perubahan yang terjadi di dalam eksternal dan internal organisasi. Perubahan eksternal misalnya terkait dengan pemerintah (perubahan politik dan ekonomi). Sedangkan, aspek internal misalnya perubahan kebijakan manajemen yang berpengaruh terhadap karyawan. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi dan harapan antara organisasi dan *stakeholders*.

Coombs dalam *Ongoing Crisis Communication* (2007:42) selanjutnya menjelaskan bahwa perbedaan persepsi dan harapan yang dibiarkan berpotensi menimbulkan perlawanan *stakeholders*, salah satunya dengan menyebarkan publikasi negatif tentang organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu mempunyai daya legitimasi ketika isu tersebut menyita perhatian publik. Dan hal tersebutlah yang menjadi bahan kajian penelitian ini.

Dalam Cutlip, Center dan Broom dinyatakan gagasan umum tentang opini publik adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama. Tetapi pernyataan mengenai kesepakatan individual untuk mendefinisikan opini publik ini melupakan bahwa opini ini bersifat publik. Pemikiran setiap individu bisa jadi mewakili atau bisa jadi tidak mewakili pemikiran bersama. Sebab, pemikiran bersama lebih merepresentasikan jenis opini yang membentuk atau dibentuk oleh diskusi publik di kalangan pihak-pihak yang berbagi '*sense of commonness*'. Jadi, opini publik lebih dari sekedar kumpulan pandangan yang dianut oleh kategori kelompok individu pada satu waktu. Opini publik tidak bisa hanya didefinisikan sebagai sebuah keadaan kesadaran individu.

Sebaliknya, opini publik merefleksikan proses di mana ide-ide diekspresikan, disesuaikan, dan dikompromikan dalam rangka menuju determinasi kolektif dari suatu arah tindakan (Price & Roberts dalam Cutlip, Center & Broom, 2006:239). Opini publik dijumpai di antara publik, atau kelompok orang yang berkomunikasi yang memiliki kepentingan yang sama. Mereka secara kolektif menganut pandangan tentang suatu isu, mengapa isu itu menjadi perhatian, dan apa yang harus dilakukan dalam situasi itu. Proses ini berlangsung terus-menerus.

Jadi bisa disimpulkan opini publik merupakan kelompok-kelompok orang yang minatnya sama dan perhatiannya sama terhadap sesuatu. Setelah kelompok orang itu tertarik, menaruh kepentingan kepada objek tadi, barulah terdapat opini di antara mereka. Opini yang tadinya merupakan opini pribadi jika digabungkan jadilah opini kelompok. Opini kelompok inilah yang kemudian menjadi opini publik karena

opini sebelumnya merupakan gabungan opini yang menaruh minat atau kepentingan terhadap sesuatu objek atau masalah tertentu.

Jika dikaitkan dengan komunikasi, opini publik erat kaitannya dengan komunikasi politik. Menjurus pada pengertian komunikasi menurut Harold Lasswell, komponen sistem komunikasi politik ada komunikator (*who*), pembicaraan atau pesan politik (*says what*), khalayak komunikasi politik (*to whom*), saluran komunikasi politik (*in which channel*), dan dengan dampak apa (*with what effect*) yang ditimbulkannya sangat mempengaruhi pembentukan opini publik. Komunikasi politik yang dijalankan dengan efektif dan semestinya akan membentuk opini publik yang sesuai dengan pesan politik itu sendiri. Dengan demikian, opini publik yang terbentuk akan mempengaruhi pendapat masing-masing masyarakat terhadap isu politik yang sedang terjadi.

Dengan kata lain, opini publik dan komunikasi politik tak dapat dipisahkan. Komunikasi politik akan membentuk opini publik, opini publik mempengaruhi pendapat yang berkembang dalam masyarakat, dan opini yang berkembang dalam masyarakat akan mempengaruhi strategi penggunaan komunikasi politik oleh komunikator politik. Media komunikasi yang dipandang paling efektif dalam membentuk opini publik terkait informasi politik adalah media massa. Namun seiring perkembangan teknologi komunikasi, media sosial juga dianggap sebagai media yang sangat ampuh untuk membentuk opini publik.

2.1.3 Ideologi Media Massa

Menurut Karl Marx, ideologi adalah sebuah sarana yang digunakan bagi penguasa sehingga dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal biasa. Ideologi ini menjaga masyarakat dalam sebuah bentuk kesadaran palsu, kesadaran manusia tentang siapa dirinya, bagaimana mereka berelasi dengan bagian lain dari masyarakat dan pengertian yang kita miliki tentang pengalaman sosial yang dihasilkan oleh masyarakat dan lingkungan tempat kita dilahirkan (Fiske, 1990: 239).

Raymond William mengklasifikasikan makna ideologi menjadi tiga, yaitu: (1) ideologi merupakan sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki kelompok atau kelas tertentu, (2) Ideologi adalah sebuah kesadaran palsu, dengan seperangkat kategori dimana kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain, (3) Ideologi merupakan sebuah proses umum makna dan ide (Eriyanto, 2007:87-92).

Ideologi berkaitan dengan konsep seperti pandangan dunia, sistem kepercayaan dan nilai. Namun, ruang lingkup ideologi lebih luas daripada konsep-konsep tersebut. Ideologi tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan yang terkandung mengenai dunia, tapi juga cara yang mendasari definisi dunia. Oleh karena itu, ideologi tidak hanya berkaitan dengan politik, namun ideologi memiliki cakupan yang lebih luas lagi dan mengandung makna konotasi (Cruteau, 1997:163).

Penulis bisa menyimpulkan yang bahwa ideologi merupakan wadah yang digunakan untuk penyaluran ide-ide pihak yang berkuasa sehingga bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat serta dapat memengaruhi isi media. Ide-ide tersebut merfleksikan sudut pandang, pikiran, ataupun hal-hal sebagainya tentang ranah kenegaraan seperti isu politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Ideologi juga merupakan salah satu mekanisme simbolik yang berperan sebagai kekuatan pengikat dalam masyarakat. Tingkat ideologi menekankan pada kepentingan siapakah seluruh rutinitas dan organisasi media itu bekerja (Shoemaker, 1996:223).

Kepentingan atau kekuasaan apa yang ada dalam media akan ditempuh melalui media sehingga media tidak lagi bersifat netral. Media bukanlah ranah keadilan dan kesetaraan dimana kepentingan bersama dan pemaknaan dari berbagai pihak akan mendapat perlakuan yang seimbang. Padahal sebenarnya media massa diciptakan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik dan mempengaruhi mereka dan ideologi suatu media itu sendiri erat kaitannya dengan kepentingan media. Kepentingan-kepentingan itulah yang menentukan apakah informasi yang disampaikan oleh suatu media mengandung fakta dan dapat dipastikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Terkadang informasi yang media sajikan menjadikannya sebagai alat komunikasi massa untuk kepentingan penguasa dengan tujuan-tujuan yang telah didramatisir.

2.1.4 Pemberitaan

Pemberitaan berasal dari kata dasar “berita” yang berasal dari kata sanskerta, *vrit* “ada atau terjadi” atau *vritta* yang berarti “kejadian atau peristiwa”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berita adalah laporan tercepat mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita dalam bahasa Inggris disebut *news*. Dalam *The Oxford Learner’s Dictionaries* terbitan Oxford University Press (1979), *news is new information about something that has happened recently* (berita adalah informasi baru tentang sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini).

Menurut William S. Maulsby, pemberitaan adalah sesuatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Secara tidak langsung dalam pengertian ini media massa harus bertindak sesuai dengan kaidah Jurnalistik pemberitaan. Media harus bersikap netral tanpa ada embel-embel suatu kepentingan politik, atau disusupi oleh para elit politik yang berkuasa (Kusumaningrat, 2006).

Kemudian Nothclife menjelaskan pengertian berita pada unsur “keanehan” atau “ketidaklaziman” sehingga mampu menarik perhatian dan rasa ingin tahu (*curiosity*). Ia mengatakan, “Jika seekor anjing menggigit orang, itu bukanlah berita. Tetapi jika orang menggigit anjing itulah berita” (*If a dog bites a man, it is not news. But if man bites a dog is news*) (Romli, 2014:4).

Media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. Media secara pasti membentuk opini publik untuk menggarungi perubahan (*movement*). Media massa tidak hanya sekedar memberikan informasi, pengajaran, atau hiburan saja, melainkan juga mengajak khalayak untuk melakukan perubahan tingkah laku. Dengan meninjau isi yang ditawarkan media yang menarik, muncul rasa penasaran audiens atau publik.

Salahsatu pengamat dan praktisi media di Indonesia, DR. Sunandar Ibnu Nur, M.A, menjelaskan mengenai revolusi informasi yang menjadi sebuah bentuk kolonialisme baru yang membuat sulit untuk membedakan mana kawan dan mana lawan, dimana media informasi secara tidak langsung dijadikan sumber untuk menciptakan realitas politik semu, kebaikan yang hanya seolah-olah, kemudian disebut-sebut sebagai ladang citra sehingga muncul penilaian yang abstrak terhadap politik (Putra, 2012:142). Media informasi dijadikan aset kejahatan dan menutup realitas politik, yang seolah-olah tidak terdapat citra kebaikan disana. Sehingga menimbulkan teka-teki massal yang menjadi pengaruh dan perdebatan di tengah masyarakat.

2.1.5 Pengertian Komunitas

Kata “komunitas” berasal dari bahasa latin *communities* yang berarti ”kesamaan”, kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti “sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

komunitas adalah kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Menurut Oxford Learner's Dictionaries, *community is all the people who live in a particular area, country, etc. when talked about as a group* (komunitas adalah semua orang yang tinggal di daerah tertentu, negara, dan lain-lain ketika dibicarakan sebagai sebuah kelompok).

Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu- individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa (Wenger, 2002:4). Sebuah komunitas merupakan sekumpulan individu yang mendiami lingkungan tertentu serta terkait dengan kepentingan yang sama (Iriantara, 2004:22). Menurut Kertajaya Hermawan (2008), komunitas merupakan sekelompok manusia yang memiliki rasa peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan *interest* atau *values*.

Menurut Crow dan Allan (1994), komunitas dapat terbagi menjadi dua komponen, yaitu:

- a. Berdasarkan lokasi atau tempat wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat dimana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis.

- b. Berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras, maupun berdasarkan kelainan seksual.

Penulis dapat mengartikan yang bahwa komunitas adalah kelompok orang yang saling memiliki minat dan ketertarikan yang sama serta saling mendukung dan saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Maka sebuah komunitas merupakan sebagian kecil dari wadah yang bernama organisasi yang dimana di dalamnya terdapat kesepakatan, kebebasan, dan hak dalam kehidupan sosial untuk bersatu dalam kesatuan kelompok serta mengeluarkan pendapat untuk kemaslahatan bersama.

2.1.6 Pengertian Pariwisata

Menurut UU No. 10 Tahun 2009, kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Salah Wahab dalam Oka A Yoeti (2008:111), menjelaskan bahwa pariwisata sebagai suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Sedangkan Pendit (2003:20) dalam Sitorus (2008:34), mendefinisikan pariwisata sebagai suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Pariwisata dalam hal ini merupakan aktifitas rekreasi yang dilakukan sewaktu-waktu dengan tujuan menghibur diri dan orang lain dengan bepergian ke tempat-tempat yang dianggap layak kunjung dan memberi kesan hangat dan baik kepada mereka setelah lepas dari tempat tersebut. Pariwisata memang telah menjadi alternatif pokok jika para individu yang sekolah, bekerja, dan lain-lain untuk sekedar lepas dari masa jenuh dan meninggalkan rutinitas tersebut untuk sementara waktu.

2.1.7 Pengertian Wisata Halal

Pariwisata Islami merupakan kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi syariat Islam (Kemenpar, 2012). Fasilitas dan layanan yang disediakan tersebut tidak berbeda dengan fasilitas umum lainnya, hanya saja fasilitas dan layanan yang disediakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam sehingga wisatawan muslim dapat menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat.

Pariwisata halal ini sudah dipromosikan semenjak dua puluh tahun lalu dari pembahasan pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pariwisata jenis ini datang dari keinginan berwisata *based on Muslim traveler lifestyle* itu sendiri. Disamping memang wisata halal menawarkan pengalaman berwisata yang nyaman, aman, sederhana, dan fleksibel, dan tidak memihak (COMCEC Coordination Office, 2016:24-25).

Istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism, syari'ah tourism, halal travel, halal friendly tourism destination, Muslim-friendly travel destinations, halal lifestyle*, dan lain-lain (Jaelani, 2017:7). Namun secara khusus dan tepat, pariwisata halal merupakan kegiatan perdagangan atau bisnis yang halal. Dalam literatur Islam, istilah "halal" merujuk pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadi landasan bagi perilaku dan kegiatan umat Islam (Diyagnet Isleri Başkanlığı, 2011). Secara

khusus, halal digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi menurut Al-Qur'an atau Hadis Nabi (Gulen, 2011).

Disaat peluncuran *halal tourism* yang bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) pada tahun 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober s/d 2 November 2013 di Semeru Room, Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013), President *Islamic Nutrition Council of America*, Muhammad Munir Caudry, menyampaikan bahwa, “Wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan muslim (Wuryasti, 2013).

Menurut Sofyan (2012:33) dalam Kemenpar (2015) definisi wisata halal yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata halal bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Kriteria atau indikator umum pariwisata halal adalah memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, dan namun harus menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Sedangkan dari perspektif industri, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu *business opportunity*. Teruntuk para pelaku industri pangan yang target

konsumennya sebagian besar umat muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk untuk meningkatkan *intangible value*. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim (Hamzah & Yudiana, 2015 dalam Kemenpar, 2015).

2.1.8 Pengertian Wisata Syariah

Pariwisata syariah merupakan kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Aan Jaelani: 2017:13). Konsep wisata syariah tertuju pada sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kepariwisataan. Nilai-nilai tersebut sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Islam dan menjadi wadah dalam membangun kegiatan pariwisata.

Wisata syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajian mulai dari akomodasi, restoran yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman (Suherlan: 2015:63). Konsep wisata syariah merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Sureerat Chookaew, Oraphan Chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, and Sudarat Nimpaya: 2015, 739).

Konsep wisata Syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya (Hairul Nizam Ismail: 2013, 397-405).

Jadi bisa disimpulkan yang bahwa wisata syariah adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan muslim. Dalam hal ini segala yang menyimpang tidak diperbolehkan mengambil peran, seperti mudahnya akses tanpa jarak antara laki-laki dan perempuan (karena hal tersebut tidak sesuai dengan landasan Islam) serta mudahnya ditemukan tempat yang menyediakan minuman dan makanan haram sebagai menu andalan.

Menurut Chookaew (2015:277), setidaknya ada delapan faktor standarisasi dalam pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya yaitu:

- a. Pelayanan kepada wisatawan haruslah cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;

- d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
- e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
- f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
- g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
- h. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Dari karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan oleh Chookaew (2015), terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah, diantaranya :

- a. Lokasi. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
- b. Transportasi. Penerapan pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan (Utomo, 2014 dalam Chukaew 2015).
- c. Konsumsi. Memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 3. Segi kehalalan disini baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata (Moira, 2012

dalam Chukaew, 2015).

d. Hotel. Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Utomo dalam Chukaew, 2015). Menurut Rosenberg (dalam Sahida, 2009), pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, *gym*, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah dengan alasan tidak terjadinya sesuatu hal yang menyimpangi moral dan etika masyarakat.

2.1.9 Konsep dan Kebijakan Pariwisata di Indonesia dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Bab I).

Dalam membangun pariwisata halal maka perlu adanya kebijakan-kebijakan yang harus didukung, diterapkan dan dijalankan supaya wisata halal dapat dijalankan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sehingga wisatawan muslim mendapat kenyamanan saat berwisata. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 10. Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 3 dinyatakan bahwa kepariwisataan berfungsi

memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 5 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2025, tidak dicanangkan program atau rencana implementasi wisata halal namun memprioritaskan penyediaan fasilitas umum atau keperluan untuk wisatawan tertentu yang terdapat pada Pasal 41 poin c yang berbunyi “Strategi peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi: a) penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta, b) penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan, c) penerapan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.”

2.1.10 Pengertian Demonstrasi dan Asasnya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal (unjuk rasa). “Mendemonstrasi” berarti menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi. Kemudian Sajogyo (1977) dan Tjondronegoro (1990) menyatakan bahwa demokrasi merupakan cara dan sekaligus tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk

pemerintahan desa.

Ditegakkannya demokrasi pada kehidupan bermasyarakat dalam negara modern merupakan hal yang dianggap esensial dan kesadaran ini dikonkritkan dalam pasal-pasal konstitusi negara (UUD 1945). Sebagai penjelasan, Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam Pasal 28 E No.3 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ini menunjukkan bahwa menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara merupakan amanat konstitusi. Karena itu pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya wajib menghormati dan memfasilitasinya.

Konstitusi Indonesia sangat menghormati dan memberi tempat yang layak bagi masyarakat yang ingin melakukan aksi di ruang publik. Aksi unjuk rasa ini secara konstitusional merupakan bagian dari perwujudan demokrasi itu sendiri. Dalam konsideran menimbang UU Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa “kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Selanjutnya pada Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa “unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”. Sangatlah jelas bahwa aksi unjuk rasa dilindungi

undang-undang dan merupakan perwujudan demokrasi.

Melihat dari kiprah pemerintahan di kerajaan Jawa, seperti keraton Surakarta (Wahjoedi, 2003), telah menginternalisasikan budaya “unjuk rasa” sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kebijaksanaan raja atau istana. Dalam tatanan masyarakat Indonesia pada jaman prademokrasi yang religius telah dibangun mekanisme kelembagaan unjuk rasa, yaitu sebagai saluran aspirasi “ketidakcocokan” (anggota atau) masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kerajaan. Telah menjadi pemahaman umum di masyarakat bahwa tugas raja (dalam penyelenggaraan pemerintahan) adalah untuk berperan sebagai “Ratu Adil” (Kontjaraningrat, 1984). Hal ini merupakan kewajiban moral sebagai wakil Tuhan di bumi.

2.1.11 Tingkatan Sikap

Menurut Notoadmodjo (2003), sikap terdiri dari berbagai tingkatan yaitu :

a. Menerima (*receiving*).

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek).

b. Merespon (*responding*)

Memberikan jawaban apabila memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang tersebut menerima ide itu.

c. Menghargai (*valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

d. Bertanggung jawab (*responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.

2.1.12 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap

Menurut Azwar S (2011:30) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu:

a. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap apabila pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Individu pada umumnya cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

c. Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya. Sebagai akibatnya, tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah.

d. Media massa

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara obyektif berpengaruh terhadap sikap konsumennya.

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem kepercayaan. Tidaklah mengherankan apabila pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

f. Faktor emosional

Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian ini membahas tentang opini komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap pemberitaan wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rose Emmaria Tarigan

dan Abdul Basit pada tahun 2020 dengan judul Penolakan Publik terhadap Program Wisata Halal Danau Toba. Pada penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yang bahwa masyarakat Indonesia yang plural, pejabat publik (politisi) dituntut memiliki kompetensi dalam komunikasi politik, terutama kemampuan dalam memahami khalayak atau konstituennya.

Perbedaan latar belakang khalayak menjadikan kompetensi ini sangat penting sehingga komunikator bisa merancang pesan dengan baik dan terhindar dari salah penafsiran. Selain kemampuan memahami (menganalisis) khalayak, aspek lain yang juga penting ialah memiliki bukti dalam presentasi yang diwakili oleh ethos, pathos, dan logos. Dengan ethos, komunikator bisa menjadi sosok yang kredibel (bisa dipercaya) oleh konstituennya sehingga akan mempermudah penyampaian argumentasi (logos) pada suasana persuasi yang ingin dibangun (pathos). Tanpa kompetensi-kompetensi tersebut, amat mungkin disalahartikan dan berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat (Tarigan dan Basit, 2020).

Meskipun dalam hal ini penulis meneliti tentang polemik wisata halal di Danau Toba seperti yang diteliti oleh Rose Emmaria Tarigan dan Abdul Basit, namun tetap terdapat perbedaan. Jika Rose Emmaria Tarigan dan Abdul Basit meneliti masalah aksi atau penolakan publik terhadap wisata halal di Danau Toba, sedangkan penulis meneliti masalah pemberitaan yang menjadi pemicu aksi penolakan terhadap wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba tersebut yang akhirnya menimbulkan polemik.

2.3 Anggapan Dasar

Ada beberapa tanggapan yang telah menjadi titik tolak penulis dalam melakukan penelitian ini. Setiap penelitian yang dilakukan harus berpijak pada suatu pendapat atau anggapan dasar yang sesungguhnya telah diyakini oleh peneliti. Anggapan dasar ini pada penelitian sangat penting menjadi pedoman atau landasan bagi proses pemecahan masalah yang telah diteliti yang didapatkan dari studi perpustakaan, media, dan fenomena. Maka dari itu, penulis beranggapan sebagai berikut :

- a. Pemberitaan terkait wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba keliru sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
- b. Wacana membangun fasilitas pendukung wisatawan memang ada dicanangkan, tetapi kekeliruan suatu pihak menjadi puncak masalah.
- c. Kekeliruan pemberitaan yang menyebabkan salah menginterpretasikan pernyataan Gubernur Sumatera Utara disebabkan oleh minimnya informasi dan ingin cepat memutuskan pernyataan terkait.
- d. Masyarakat terkhususnya di sekitaran Danau Toba tidak memahami hakikat wisata halal yang sebenarnya tidak mengesampingkan budaya leluhur mereka.
- e. Aksi protes yang disebabkan oleh salahnya pemberitaan ini merupakan aksi rasa tanggung jawab masyarakat sekitar Danau Toba yang ingin terus menjaga dan melestarikan budaya leluhur mereka.

- f. Dalam hal ini, pemerintah terkhususnya perantara Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membongkar kekeliruan pemberitaan tersebut sehingga wacana ini perlu dikaji kembali atau bahkan ditiadakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif. Menurut Nazir dalam Andi Prastowo (2011:186), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono, 2010:9). Menurut Poerwandari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang digalinya (Moleong, J.L.2002:3).

Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73) mengemukakan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-

variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang memerlukan akurasi data dan penjelasan yang jelas yang menuntut peneliti perlu untuk langsung terjun ke lapangan bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif kiranya lebih tepat untuk digunakan.

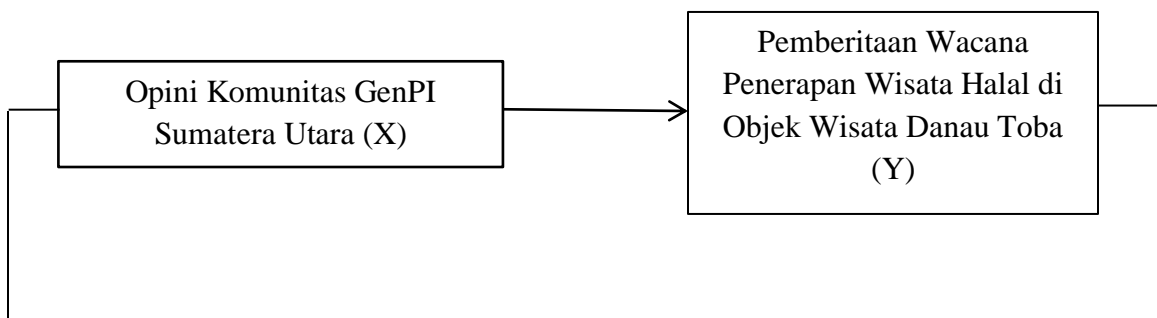
Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu gambaran deskriptif mengenai opini publik terhadap pro dan kontra tentang pemberitaan wacana wisata halal di objek wisata Danau Toba. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2010:10). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa variabel yaitu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menjadi sebab

timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2006:3). Jadi, yang menjadi variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Opini Komunitas GenPI Sumatera Utara, sedangkan variabel terikat (Y) adalah Pemberitaan Wacana Penerapan Wisata Halal di Objek Wisata Danau Toba.

Berdasarkan variabel tersebut, maka kerangka konsep yang penulis susun adalah sebagai berikut :



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep bermaksud untuk menjelaskan unsur penelitian yang telah diuraikan diatas. Berdasarkan kerangka konsep yang telah dipaparkan, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

- a. Opini publik merupakan pendapat yang datang dari sekelompok atau banyak kelompok dengan minat yang sama dan perhatiannya sama terhadap sesuatu. Pendapat tersebut bisa tersalurkan ketika kelompok

tersebut menaruh perhatian dan kepentingan bersama kepada suatu hal dan perlu mendapatkan solusi.

- b. Pemberitaan merupakan suatu sarana informasi terkini dan faktual yang baru saja terjadi yang dapat menarik perhatian pembaca, baik itu dari media massa, elektronik, atau online dan menjalani dengan baik etika jurnalistik media itu sendiri. Wisata halal adalah suatu bentuk wisata yang didasarkan pada prinsip islam dan dicanangkan untuk memenuhi fasilitas atau kebutuhan bagi para wisatawan muslim, terutama di negara-negara non Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan seperti contoh menyediakan tempat ibadah mushola, rumah makan halal, dan lain-lain.

3.4 Kategorisasi

Agar penelitian lebih empiris, maka konsep diatas harus dikategorisasikan dengan cara mengubahnya menjadi variabel kembali dan diuraikan indikator apa saja yang mencerminkan variabel ini.

Tabel 3.1
Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Opini Komunitas GenPI Sumatera Utara (X)	Opini publik merupakan suatu aksi yang erat kaitannya dengan kepercayaan mengenai sesuatu (<i>belief</i>), apa yang sebenarnya	- Kepercayaan mengenai sesuatu (<i>belief</i>) - Apa yang dirasakan atau menjadi sikap

	<p>dirasakan atau menjadi sikap masyarakat (<i>attitude</i>), dan berlandaskan persepsi (<i>perception</i>) yang berakar dari beberapa faktor, yaitu latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita-berita atau pendapat yang berkembang dan kemudian mempengaruhi pandangan masyarakat.</p> <p>(Abelson dalam Ruslan, 2007:66)</p>	<p>masyarakat (<i>attitude</i>) - Berlandaskan persepsi (<i>perception</i>)</p> <p>(Ruslan, 2007:66)</p>
<p>Pemberitaan Wacana Penerapan Wisata Halal di Objek Wisata Danau Toba (Y)</p>	<p>Pemberitaan adalah sesuatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Secara tidak langsung dalam pengertian ini media massa harus bertindak sesuai dengan kaidah Jurnalistik pemberitaan. Media harus bersikap netral tanpa ada embel-embel suatu kepentingan politik, atau di susupi oleh para elite politik yang berkuasa.</p> <p>(William S. Maulsby dalam Kusumaningrat, 2006)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta - Mempunyai arti penting dan baru terjadi - Media massa harus bertindak sesuai dengan kaidah jurnalistik pemberitaan - Media netral

	<p>Wisata halal yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata halal bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Kriteria umum wisata halal adalah memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, dan namun harus menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum - Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan - Menghindari kemusyrikan dan khurafat - Bebas dari maksiat - Menjaga keamanan dan kenyamanan - Menjaga kelestarian alam dan lingkungan - Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. <p>[Sofyan (2012:33) dalam Kemenpar (2015)]</p>
--	---	---

3.5 Informan atau Narasumber

Menurut Amirin (Idrus, Muhammad, 2009:91) mengartikan subjek sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya untuk diperoleh keterangan sesuai data yang diambil. Sedangkan menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip

Sarantakos (1993) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sedikit banyak dapat dianalogikan dengan proses penyelidikan (investigasi), tidak banyak berbeda dengan kerja detektif yang harus mendapat gambaran dan sense tentang fenomena yang diselidikinya. Pengambilan sampel baru dapat ditetapkan lebih tergas setelah penelitian dimulai, dan kurang bermanfaat apabila ditentukan terlalu cepat dari awal (Poerwandari Kristi, 2005:107).

Teknik pengambilan sampel untuk subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiono, 2010:218).

Dalam penelitian ini, jumlah informan yang penulis tetapkan adalah 7 (tujuh) orang informan selaku anggota komunitas Generasi Pesona (GenPI) Sumatera Utara seperti yang tertera berikut:

Tabel 3.2
Daftar Identitas Responden Penelitian

No	Nama	Usia	Domisili	Pekerjaan	Jabatan
1	Ricky Febriansyah	26	Medan Selayang	<i>Freelance</i>	Ketua Harian GenPI Sumut
2	Fit Hartoyo	33	Jl. Jalak 4 Perumnas Mandala	Fotografer, konten kreator	Humas GenPI Sumut

3	Fachri Maulana	21	Deli Serdang	Wirausaha	Ketua divisi <i>creative and content</i>
4	Clara	24	Medan Petisah	Karyawan swasta	Anggota Divisi <i>offline</i>
5	Ardiansyah Makrif	24	Perbaungan, Serdang Bedagai	Karyawan swasta	Anggota divisi <i>offline</i>
6	Aurellya Ocxax	21	Kota Medan	Mahasiswa	Anggota divisi <i>offline</i>
7	Junius Ivan Buci	25	Medan Selayang	<i>Freelance</i>	Anggota dan videografer resmi GenPI Sumut

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian, maka penulis mengambil beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1 Tahap prapenelitian

Penulis melakukan *mini research* untuk menemukan masalah penelitian. Kemudian penulis melakukan studi pendalaman pendahuluan untuk memperdalam permasalahan dan penggalian informasi terhadap masalah sehingga memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya, menyusun rancangan penelitian yaitu memilih metode penelitian yang akan digunakan dan tata cara yang akan dilakukan pada saat penelitian. Yang terakhir, menetapkan informan dan waktu serta materi berupa pertanyaan yang akan didiskusikan pada saat penelitian.

3.6.2 Tahap penelitian

a. Wawancara mendalam (*indept interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan (Rahayu, Iin Tri, 63). Sepihak artinya menerangkan tingkat kepentingan antara *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (yang diwawancara). Tujuan penyelidikan menurut Lincin dan Guba antara lain adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain (Rahayu, Iin Tri, 64).

Wawancara mendalam menyerupai percakapan tidak resmi (informal). Metode ini digunakan dengan tujuan memperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri masing-masing responden. Wawancara jenis ini bersifat terbuka dan luwes serta susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan dan lain sebagainya) (Qudsiah, Nazilatul, 2012:60).

Secara umum, ada tiga pendekatan dasar dalam memperoleh data kualitatif melalui wawancara (Patton dalam Poerwandari, 1998).

- 1) Wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka. Dalam bentuk wawancara ini, pedoman wawancara ditulis secara rinci, lengkap dan set

pertanyaan dan penjabarannya dalam kalimat. Peneliti diharapkan dapat melaksanakan wawancara sesuai sekuensi yang tercantum, serta menanyakannya dengan cara yang sama pada responden-responden yang berbeda. Keluwesan dalam mendalami jawaban terbatas, tergantung pada sifat wawancara dan keterampilan dan keterampilan peneliti.

- 2) Wawancara dengan pedoman umum. Dalam proses wawancara ini, peneliti dilengkapi pedoman wawancara yang angat umum, yang mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tanpa bentuk pertanyaan eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, sekaligus menjadi daftar pengecek (*checklist*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian, peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung.
- 3) Wawancara konvensional yang informal yang merupakan proses wawancara didasarkan sepenuhnya pada berkembangnya pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi ilmiah. Tipe wawancara demikian umumnya dilakukan peneliti yang melakukan observasi partisipatif. Dalam situasi demikian, orang-orang yang diajak berbicara mungkin tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai secara sistematis untuk menggali data.

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dilakukan bertujuan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dengan teknik observasi atau teknik lainnya. Disamping itu juga untuk mengungkap hal-hal yang sesuai dengan topik ini. Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, maka terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara (*guide interview*). Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan wawancara dapat terarah pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Dengan demikian, tahapan wawancara dilaksanakan. Ada secara langsung dan tidak secara langsung. Terdapat 3 (tiga) informan yang berdomisili di Kota Medan bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai langsung. Namun, disebabkan karena keterbatasan kesediaan waktu dan tempat, sebanyak 4 (empat) informan dengan keterangan 2 (dua) informan berdomisili di Deli Serdang dan Serdang Bedagai dan 2 (dua) informan berdomisili Kota Medan namun sedang berada diluar daerah diwawancarai melalui panggilan video (*video call*) dengan alasan aksesibilitas dan waktu.

3.6.3 Tahap pascapenelitian

Tahap ini diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang sedang diamati untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya (Mulyana, Dedy, 2001:180).

Data yang ingin peneliti dapatkan dengan menggunakan metode ini adalah deskripsi umum tentang subjek. Untuk selanjutnya difokuskan pada dinamika resiliensi dan penyesuaian diri individu yang menjadi objek penelitian. Teknik ini dilakukan secara perdana, langsung dan tepat sasaran terhadap suatu isu yang akan dijadikan penelitian. Hal ini lah yang menjadi bakal penelitian dan menemukan masalah yang akan dipecahkan. Segala bentuk hasil analisis dan data yang didapat dari proses ini akan dianalisa sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai kasus penelitian.

3.6.4 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, *website*, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti (Arikunto, 1993:202). Dalam menggali data dalam penelitian ini, selain menggunakan metode wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah berupa catatan dan alat perekam serta dokumentasi berupa foto atau gambar.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian

(Indriantoro, 2002:11). Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Abdurrahman, Soejono, 1999:23). Melalui analisis deskriptif, peneliti mendeskripsikan informasi yang telah didapat dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang opini komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap wacana wisata halal di objek wisata Danau Toba.

Model analisis data deskriptif dalam penelitian ini dijalankan dengan asas model analisis interaktif. Miles dan Huberman (1992) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Data reduction (reduksi data) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. *Data display* (penyajian data), penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Hal ini untuk mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Kemudian, *conclusion drawing/verification* yang merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pertama bersifat sementara, dan akan berubah

bila tidak ditemukan bukti yang mendukung. Kesimpulan adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2005:959).

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 11 Mei 2021. Untuk wawancara pertama yang salahsatu informannya adalah Ketua Harian GenPI Sumatera Utara serta seorang anggotanya dilaksanakan pada Rabu, 05 Mei 2021 yang berlokasi di McDonald's Medan Tasbi (Jalan Gagak Hitam Arteri Ring Road, Medan Sunggal). Wawancara kedua dilaksanakan pada Sabtu, 08 Mei 2021 dengan informan Humas GenPI Sumatera Utara yang berlokasi di Aceh Corner (Jalan Slamet Ketaren, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Deli Serdang). Selanjutnya, wawancara dengan 4 (empat) informan lain yang tidak bisa diwawancara secara langsung, proses wawancara dilaksanakan dengan menggunakan *platform* teknologi panggilan video (*video call*) pada tanggal 10 dan 11 Mei 2021.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek dan Subjek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2005:29), objek penelitian adalah variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah opini komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap pemberitaan wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba. Menurut Suharsimi Arikunto (2005:116), subjek penelitian adalah benda, hal, atau

orang tempat data untuk variabel penelitian. Maka subjek penelitian yang diteliti adalah komunitas Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara.

3.9.1 Sekilas tentang Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara

GenPI adalah singkatan dari Generasi Pesona Indonesia yang merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari anggota yang memiliki ketertarikan pada bidang pariwisata. Pesona Indonesia itu sendiri merupakan slogan pariwisata Indonesia yang diusung oleh Kementerian Pariwisata untuk menjadi ujung tombak segenap upaya peningkatan pariwisata Indonesia. Bersifat relawan, komunitas GenPI terdiri dari banyak netizen yang hobi bermedia sosial. Dalam dunia maya, mereka juga aktif dalam dunia *traveling*, fotografi, videografi, dan menulis (Website resmi GenPI). Saat ini Genpi sudah ada di 34 provinsi, tak terkecuali di Sumatera Utara.

Membantu mempromosikan pariwisata daerah dan nasional menjadi targetnya GenPI nasional maupun GenPI Sumatera Utara. Dengan tanpa disadari, para anggota yang bergabung sudah bisa memberi manfaat untuk Indonesia dan daerah yang sedang diangkat pariwisatanya. GenPI Sumatera Utara juga telah berkolaborasi dengan banyak pihak di berbagai daerah dalam membangun atas apa yang disebut Menteri Pariwisata sebagai Destinasi Digital. GenPI bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti koperasi, pokdarwis, karang taruna, serta berbagai komunitas yang ada di desa. GenPI bisa memberikan *creative* dan *commercial value* yang didapatkan di berbagai tempat (<https://genpisumut.com>). GenPI Sumatera Utara ini sendiri

bermarkas di Kompleks Tasbi 2 Blok 11 No 3 Jl. Ring Road Kel Asam Kumbang, Medan, Sumatera Utara. Komunitas ini sendiri dikoordinir oleh Sdr. Edi Purnomo.

3.9.2. Struktur Organisasi Kepengurusan Generasi Pesona Indonesia Sumatera Utara (GenPI Sumut) Masa Jabatan 2021-2023

Gambar 3.1

Logo GenPI Sumatera Utara



Sumber foto : Facebook GenPI Sumut Official

Koordinator	: Edi Purnomo
Ketua Harian	: Ricky Febriansyah
Sekretaris	: Retno Putri Widyastri
Bendahara	: Citra Tuz Jannah
Ketua Divisi 1 (SDM dan Organisasi)	: Andika Wahyu P
Ketua Divisi 2 (<i>Online</i>)	: Ade Alvianita Damanik
Ketua Divisi 3 (<i>Offline</i>)	: Zuhri Fiko Ginola
Ketua Divisi 4 (<i>Creative and Content</i>)	: Fachri Maulana
Ketua Divisi 5 (Humas)	: Fit Hartoyo

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai informan, maka diperoleh berbagai opini atau tanggapan tentang pemberitaan wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba yang terjawab dari 11 (sebelas) pertanyaan yang telah penulis tentukan. Untuk pertanyaan pertama mengenai penjelasan atas pengertian wisata halal, informan 1, Sdr. Ricky Febriansyah selaku Ketua Harian GenPI Sumatera Utara berpendapat bahwa wisata halal itu adalah sebuah konsep yang berbasis islami yang berarti tersedianya rumah makan islam, tempat ibadah islam, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Informan 2, Sdr. Fit Hartoyo, selaku Humas GenPI Sumatera Utara menjelaskan bahwa wisata halal adalah wisata yang menyajikan makanan halal, halal dari pemasakan dan kemasannya ditetapkan oleh badan BPOM dan MUI untuk kepastian halalnya. Jadi penjual makanan di sekitaran destinasi itu menjajakan makanan yang halal.

Informan 3, Sdr. Fachri Maulana, selaku Ketua divisi *creative and content* menjelaskan wisata halal itu adalah bagian dari industri wisata yang ditujukan secara khusus kepada calon wisatawan muslim yang merujuk pada aturan-aturan islam. Contohnya tersedianya makanan halal (bebas alkohol, daging babi, dan sebagainya), kemudian tersedia tempat ibadah, kamar mandi, tempat wudhu, dan lain sebagainya.

Saya rasa Indonesia sudah cukup familiar lah dengan wisata halal seperti ini.

Selanjutnya informan 4, Sdri. Clara, selaku anggota divisi *offline* berpendapat yang bahwa wisata halal itu adalah kegiatan pariwisata yang memberikan pelayanan ramah lingkungan terhadap wisatawan muslim, seperti contoh disediakan fasilitas untuk beribadah di dekat lokasi wisata tertentu, dan setidaknya memiliki tempat makan atau restoran yang halal di daerah tersebut. Informan 5, Sdr. Ardiansyah Makrif, selaku anggota divisi *offline* menjelaskan bahwa wisata halal itu bagus adanya kalau untuk didaerah Danau Toba jika ada dibuat rencana. Karena (wisata halal) bukan memandang untuk satu agama saja, tapi tujuannya itu bagus dalam artian universal (tidak hanya untuk wisatawan muslim saja), seperti makan makanan halal. Untuk masyarakat lain juga bisa. Dan adanya implementasi wisata halal ini tidak mempengaruhi eksistensi makanan lokal.

Kemudian informan 6, Sdri. Aurelly Oca, selaku anggota divisi *offline* menjelaskan bahwa pariwisata halal atau *halal tourism* itu ialah sebuah pariwisata dengan fasilitas yang diperlukan oleh setiap muslim yang sesuai dengan hukum Islam yaitu seperti di hotel/mess/wisma ataupun akomodasi tempat tinggal sementara yang menyediakan telekung atau sajadah atau alat alat sholat, dan memiliki tempat makanan halal. Namun *halal tourism* bukan hanya untuk umat muslim saja, namun juga untuk umat non muslim. Dan informan 7, Sdr. Junius Ivan Buci, selaku anggota sekaligus videografer resmi GenPI Sumatera Utara menjelaskan bahwa wisata halal itu adalah pariwisata yang menyediakan fasilitas-fasilitas untuk wisatawan muslim, seperti mudahnya mencari makanan halal atau tempat ibadah.

Pertanyaan kedua mengenai apakah memang ada wacana dari Gubernur Sumatera Utara seperti yang tertuang dalam PERDA Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk mengimplementasikan wisata halal di Danau Toba, menurut informan 1, terkait wacana mungkin ada (karena masih wacana), tetapi kalau untuk dibuat di PERDA sekarang kembali lagi kepada masyarakat di sekitar Danau Toba nya (mereka mau atau tidak). Jadi Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak bisa muluk-muluk langsung buat kalau nanti ujung-ujungnya bakal ditentang sama masyarakat sekitar danau toba. Menurut informan 2, Gubernur sendiri tidak pernah menyampaikan atau membuat *statement* tentang wisata halal di Danau Toba. Karena tidak mungkin pak Edy Rahmayadi yang orangnya sangat paham betul kultur masyarakat disana, terkhususnya 8 (delapan) kabupaten di daerah Danau Toba. Dan itu terlihat jelas di Perda yang tidak pernah dicanangkan. Selanjutnya dinas pariwisata juga menekankan dan memberikan pernyataan wisata halal itu tidak akan diterapkan di Danau Toba.

Menurut informan 3, jika beliau pribadi tidak tahu apakah memang ada wacana dari Gubernur Sumatera Utara dalam Perda Provinsi tentang kepariwisataan. Tapi yang pasti wisata halal itu sudah pernah dibantah oleh beliau (Gubernur) sejak tahun 2019. Tapi beliau menginginkan bahwa jika ada rumah makan yang menyediakan makanan halal dan ditempelkan logo halal, agar wisatawan yang membutuhkan makanan halal bisa mengetahui (dari luar saja). Kemudian beberapa pihak mendramatisir hal-hal seperti ini sehingga menyebabkan timbulnya hoaks seperti yang sempat beredar.

Menurut informan 4, kalau untuk rencana pembangunan pariwisata oleh Gubsu (Gubernur Sumatera Utara) pasti ada tapi bukan berarti daerah danau toba bisa di prioritaskan untuk destinasi pariwisata halal. Namun bisa saja menambahkan fasilitas dari unsur pariwisata halal. Informan 5 menjelaskan bahwa dirinya belum tahu pasti tentang regulasi tersebut sudah tertuang di Perda atau belum. Tapi kalau wacana (tak tertulis), sudah ada dari tahun 2019. Informan 6 berpendapat bahwa sudah ada tapi hanya sekedar wacana yang dikeluarkan oleh Gubernur mengenai wisata halal di danau toba. Kemudian informan 7 menjelaskan secara singkat yang bahwa ada wacananya (masih perencanaan).

Terkait pemberitaan tentang Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang diisukan mencanangkan wisata halal di Danau Toba tersebut benar adanya atau tidak, informan 1 menjelaskan bahwa itu benar adanya. Tapi sebenarnya pak Edy itu meneruskan dari apa yang diwacanakan oleh pemerintah pusat yaitu dari Kemenparekraf. Jadi Kemenparekraf berencana untuk membuat wisata halal lalu pak Edy Rahmayadi mengiyakan dan tertarik. Jadi kalau ditanya fakta, ya itu memang fakta.

Informan 2 menjelaskan menurutnya memang ada berita demikian tetapi itu tidak benar. Dalam artian pak Edy tidak mencanangkan wisata halal untuk ke 8 (delapan) kabupaten di daerah Danau Toba. Menurut informan 3, seperti yang telah disampaikan, wisata halal itu (dalam khusus ini) bukan berarti Danau Toba akan dijadikan sebagai wisata syariah seperti di Aceh. Itu tidak. Namun wisata halal itu berupa rumah makan muslim yang menyediakan makanan halal agar menunjukkan

simbol-simbolnya didepan (rumah makan/restoran) untuk memudahkan wisatawan muslim yang datang kesana untuk memilih rumah makan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi, pemberitaan tersebut sudah dibantah sejak tahun 2019 dan itu adalah hoaks.

Kemudian informan 4 menjelaskan bahwa berita tersebut tidak benar, faktanya adalah gubsu hanya ingin menyarankan bila ada rumah makan atau restoran yang halal bisa mencantumkan tulisan halal untuk memudahkan wisatawan muslim. Informan 5 berpendapat yang bahwa memang ada berita yang memuat Gubernur Sumatera Utara akan mewacanakan wisata halal di danau Toba. Namun disana terdapat kesalahpahaman. Informan 6 menjelaskan, berita tersebut benar adanya dan cepat menyebar, padahal kebenaran berita tersebut dipertanyakan. begitu juga dengan informan 7 yang menyatakan bahwa memang ada tapi itu kesalahpahaman yang fatal namun dianggap fakta.

Selanjutnya mengenai pertanyaan menurut beberapa sumber berita, ada kesalahpahaman informasi antara Gubernur Sumatera Utara dengan wartawan tentang wacana yang dikaitkan dengan wisata halal sehingga timbul *fake news* atau fitnah. Menurut informan 1, kalau masalah wacana wisata halal ini benar. Tapi berita ini jadi besar karena memang dibesar-besarkan dan dipelintir. Jadi ada beberapa wartawan yang informan baca, di daerah sekitaran Danau Toba yang membesarkan berita ini menjadi seolah-olah Danau Toba itu mau diislamisasi. Kalau dibilang *fake news* bisa jadi dan sebenarnya menimbulkan fitnah.

Menurut informan 2, menurutnya hal ini benar adanya. Karena tulisannya sangat menyudutkan Gubernur sebagai yang membuat kebijakan. Berita yang memuat tentang pak Edy Rahmayadi yang mewacanakan wisata halal di Danau Toba itu tidak benar. Ada penggiringan opini yang dilakukan oleh oknum jurnalis bahwasanya Gubernur membuat atau merencanakan wisata halal untuk 8 (delapan) kabupaten di sekitaran Danau Toba. Berita salah paham ini pernah muncul di grup *whatsapp* informan dan banyak di *repost* oleh masyarakat di sekitaran Danau Toba sehingga mereka terpancing emosi dan mempertanyakan. Namun Gubernur telah mengeluarkan keterangan dan jumpa pers dengan media yang ada di Sumatera Utara bahwasanya berita tersebut tidak benar dan fitnah. Namun hal ini terus saja ditanyakan. Saat menteri Kemenrekrif, Sandiaga Uno datang ke Danau Toba dan ditanyakan seputar wisata halal oleh media, dan jawaban beliau adalah “Jangan mengadu domba masyarakat disini”. Karena dari pemerintah pusat saja tidak mewacanakan wisata halal untuk Danau Toba, apalagi Gubernur Sumatera Utara.

Informan 3 berpendapat bahwasanya memang ada pihak-pihak yang salah menafsirkan tentang apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara kepada wartawan tentang wisata halal. Kemudian mereka mendramatisir isu-isu wisata halal tersebut kemudian akhirnya menyalahkan Gubernur Sumatera Utara dan menjadi masalah pada khususnya etnis suku batak di sekitar Danau Toba. Wisata halal ini bukan untuk menghilangkan kebiasaan etnis atau suatu agama tertentu. Apapun agamanya jika ingin berwisata ke Danau Toba, dipersilahkan. Atau jika mau membuka usaha di sekitaran Danau Toba, dipersilahkan. Jadi bukan berarti wisata

halal itu untuk orang islam saja. Perlu ditekankan lagi, apapun agamanya, silahkan datang. Yang pasti, ada sarana rumah makan halal bagi wisatawan muslim.

Kemudian informan 4 menjelaskan memang benar adanya. Informan 5 berpendapat bahwa beliau belum sempat melihat atau mendengar hal seperti itu. Cuma yang pernah dibaca bahwa tempat tersebut bisa memanjakan wisatawan luar agar lama berkunjung ke Danau Toba, dengan cara memperbaiki fasilitas, tempat ibadah, dan kuliner tanpa menomorduakan kearifan lokal. Untuk beritanya itu memang belum ada saya lihat. Cuma yang perlu kita ketahui wisatawan Malaysia itu paling banyak yang berkunjung ke Danau Toba. Dan tujuan ini tadi untuk memanjakan wisatawan tadi agar lebih betah dan lama berkunjung ke Danau Toba, dengan cara memuluskan pembangunan termasuk tempat ibadah dan rumah makan (kuliner).

Informan 6 berpendapat yang bahwa benar adanya dikarenakan gubernur tidak melontarkan akan menjadikan danau toba sebagai *syariah tourism*/pariwisata syariah namun menjadikan danau toba sebagai pariwisata halal/*halal tourism* karena *syariah tourism* itu lain lagi artinya yang bahwa *syariah tourism* merupakan pariwisata yang berdasarkan gaya hidup syariah. Jika pariwisata halal/*halal tourism* hanya penerapan di akomodasi penginapannya seperti menambahkan alat sholat, dan menambahkan restoran atau tempat makan halal. Dan informan 7 menjelaskan bahwa menurutnya benar. Alasannya karena wacana yang diartikan sama wartawan itu tentang penghapusan seperti budaya-budaya di Danau Toba yang non halal (makanan).

Terkait pertanyaan apa yang membuat wartawan salah dalam meminterpretasi pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara terkait hal ini, informan 1 memberikan penjelasan yang bahwa yang membuat salah, itu kembali lagi ke wartawannya yang tidak menangkap sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur. Jadi mereka membuat spekulasi lain yang mengada-ngada. Informan 2 menjelaskan menurutnya wartawan salah paham dan tulisan beritanya tidak sesuai dengan fakta karena Gubernur tidak mengeluarkan kata-kata akan diimplementasikan wisata halal. Hal ini justru memutar balikkan fakta dan menggiring opini publik.

Informan 3 menjelaskan bahwa yang membuat wartawan salah itu adalah kata “halal” itu sendiri. Jadi, tidak semua orang paham arti “halal” tersebut secara benar. Masyarakat tahu bahwa “halal” hanya sebatas makanan yang bisa dikonsumsi oleh orang islam. Jadi hanya sebatas itu saja. Seperti makanan, minuman, atau tempat-tempat yang ramah akan wisatawan muslim. Bukan berarti semua daerah itu harus dijadikan sesuai syariat islam (seperti di Aceh). Itu tidak benar.

Informan 4 memberikan pendapat yang bahwa mungkin saja kesalahpahaman itu terjadi karna kurang pemahannya arti pariwisata halal bagi kaum awam. Informan 5 berpendapat bahwa adanya kesalahpahaman antara wartawan dengan Gubernur sendiri. Karena kalau untuk masalah seperti ini, harus didiskusikan kembali agar semua jelas tanpa adanya simpang siur. Karena menurut informan sendiri, itu sangat bagus. Jadi wisawatan tadi, yang seharusnya tadi hanya tiga hari berkunjung ke Danau Toba, karena bingung menemukan makanan yang halal, menjadi hanya satu hari saja karena merasa kesulitan menemukan kuliner yang cocok. Jadi kalau untuk

masalah ini, harus diduduk barengkan lagi antara wartawan dengan humas pemerintah untuk menjelaskan maksud dan tujuan baik dari wisata halal ini.

Informan 6 menjelaskan, karena wartawan salah kaprah dan tidak mengerti mengenai perbedaan antara *syariah tourism*/pariwisata syariah dengan *halal tourism*/pariwisata halal. Informan 7 juga menjelaskan hal itu karena kurangnya penjelasan dan sosialisasi tentang apa sebenarnya wisata halal itu. Jadi mereka (wartawan) menafsirkan sendiri.

Terkait dari media mana didapatkan pemberitaan polemik wacana penerapan wisata halal di Danau Toba sehingga menimbulkan demonstrasi masyarakat, informan 1 menjawab bahwa beliau tidak membaca berita namun tau langsung info ini di media sosial Humas Sumut yang merupakan media yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Kemudian informan 2 menjawab bahwa pertama kali muncul di media online dan beliau langsung mengetahuinya. Saat ingin shalat jumat, Gubernur dihadang beberapa wartawan. Pertama wartawan tidak menanyakan isu wisata halal. Entah mengapa ada seorang wartawan menanyakan isu tersebut dan langsung ditapis oleh Gubernur. Kebetulan Humas Pemprov saat itu tidak ada. Lalu Gubernur yang memberikan pernyataan sendiri bahwa ada oknum jurnalis yang salah paham sehingga memicu konflik dan demonstrasi.

Informan 3 menjawab, jika bicara dari media mana, beliau sendiri banyak membaca di media. Ada dari media cetak (tribun), media online (merdeka.com), dari media elektronik (CNN), atau dari Good News from Indonesia (di media sosial) juga dibaca. Kemudian karena beliau mahasiswa Ilmu Komunikasi, beliau dituntut untuk

peka terhadap pemberitaan dan tentang dunia kewartawanan. Informan 4 menjelaskan yang bahwa beliau mendapatkan pemberitaan tersebut dari media sosial instagram, di televisi, dan berita online. Sedangkan informan 5 mendapatkannya dari media online seperti kumparan.com dan tempo.co. Informan 6 menjelaskan bahwasanya mendapatkannya dari pemberitaan online. Berbeda dengan informan 7 yang mendapatkannya dari pemberitaan ketiga media, media online, media sosial, dan media cetak.

Mengenai pertanyaan selanjutnya tentang pandangan para informan terkait aksi protes atau demonstrasi penolakan wisata halal di Danau Toba, informan 1 menjawab, sebenarnya aksi tersebut sah-sah saja. Karena itu kembali lagi ke masyarakatnya. Jadi kalau mereka mau mendemonstrasi diperbolehkan, namun demonstrasinya harus dibarengi dengan tujuan untuk bertemu langsung dengan Gubernur dan mengadakan audiensi dengannya atau dinas terkait.

Informan 2 menjelaskan bahwa dikarenakan awalnya memang berita tersebut telah *booming* dan para mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menapis dan meminta kejelasan kepada Gubernur terkait hal tersebut. Aksi ini sah-sah saja karena sebagai bentuk kritikan untuk pemerintah, dan bentuk arogansi pun tidak ada, damai, serta Gubernur pun menghadapinya dengan santai karena bahwasanya beliau tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang wisata halal untuk Danau Toba dan alhasil isu tersebut berlangsung reda.

Informan 3 menjelaskan lagi bahwasanya beliau melihat aksi demonstrasi penolakan wisata halal di Danau Toba tersebut adalah hal wajar. Karena siapapun

yang mungkin sumber penghasilannya terganggu, mereka akan merasa terusik dengan adanya kebijakan baru yang akan berdampak buruk terhadap penghasilan mereka. Jadi mereka wajar menyampaikan protes atau demonstrasi penolakan wisata halal dan tentunya Gubernur Sumatera Utara akan memberikan penjelasan dan solusi terbaik. Informan 4 juga menekankan bahwa aksi demonstrasi tersebut sah adanya. Mungkin dikarenakan miskomunikasi pada saat penyampaian dan saat menanggapi pengertian dari wisata halal. Tapi kalau berlebihan, beliau kurang setuju.

Informan 5 menjawab, menurutnya aksi protes tersebut terjadi karena tadi, kurangnya kepehaman dan keterbukaan dari Gubernur. Agar tidak adanya kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat sekitaran Danau Toba dan mahasiswa-mahasiswa, lebih baik diadakan diskusi bersama agar tidak ada lagi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Ini perlu mendapat dukungan penuh karena wacana ini sangat bagus. Perlu ditegaskan oleh pemerintah bahwa wisata halal bukan hanya untuk satu golongan saja, melainkan untuk semua. Sebagai tambahan, ada bagusnya juga diadakan aksi ini sebagai jalan mendapatkan pemahaman bahwa wisata halal bisa merusak kearifan lokal mereka. Namun dibalik itu semua, maksud Gubernur, tidak seperti itu. Kearifan lokal itu tetap akan dipertahankan, namun berbarengan dengan konsep wisata halal. Informan 6 menjelaskan bahwa aksi tersebut muncul karena kurangnya penyuluhan pariwisata atau edukasi pariwisata bagi masyarakat daerah tersebut. Dan informan 7 menepis aksi tersebut yang bahwa menurutnya itu merupakan demo atau aksi salah paham saja.

Berlanjut pada persoalan tentang apakah aksi demonstrasi tersebut adalah solusi terbaik, informan 1 menjawab, ini bukan merupakan solusi terbaik karena demonstrasi bisa menimbulkan kericuhan. Jadi lebih baik kembali lagi ke pernyataan yang disampaikan informan, melakukan audiensi kepada pemerintah dan dinas terkait. Berbeda dengan informan 2 yang menjelaskan bahwa aksi tersebut membuahkan hasil karena dijalankan atas dasar bentuk demokrasi di Indonesia untuk mencari kejelasan langsung dari pemerintah. Informan 3 menjawab yang bahwa kalau dikatakan demonstrasi adalah solusi terbaik, beliau rasa bukan. Karena pasti ada tahap-tahap yang lebih damai dan tenang daripada harus mengumpulkan orang-orang ke jalan kemudian berdemonstrasi di depan kantor Gubernur. Beliau rasa satu orang ketua kelompok menyampaikan aspirasi kepada Bupati di sekitaran Danau Toba (seperti Kabupaten Simalungun, Samosir, dll) dan Bupati tersebut menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada Gubernur. Jadi ada tahapan dan jembatannya untuk menuju Sumut 1.

Informan 4 hanya menjelaskan secara tegas bahwa itu bukan solusi terbaik. Namun, informan 5 menjelaskan aksi demo ini bagus adanya. Tapi alangkah lebih baiknya, setelah aksi demo itu, lebih baik didiskusikan kembali secara intens dan dirembukkan dengan keterbukaan agar semua ini tidak ada rasa sakit hati antara masyarakat dengan pemerintah. Informan 6 menjawab yang bahwa solusi tersebut tidak tepat dikarenakan demonstrasi bukan akan meredakan permasalahan namun dapat memperbesar masalah. Dan informan 7 menjawab tegas itu bukan solusi yang terbaik. Seharusnya jangan ada demonstrasi melainkan bisa melakukan audiensi atau

berjumpa langsung dengan pemerintah.

Mengenai persoalan apa yang membuat masyarakat terkhususnya masyarakat di wilayah Danau Toba belum terbuka dan tidak menerima implementasi wisata halal jika memang dicanangkan, informan 1 menjawab bahwa mereka (masyarakat di sekitaran Danau Toba) sebenarnya bukan tidak terbuka. Mereka sebenarnya miskomunikasi dengan apa yang disampaikan Gubernur. Jadi jika pihak pemerintah atau Gubernur menyampaikan informasi dengan jelas, mungkin tidak akan terjadi penolakan seperti itu.

Informan 2 menjelaskan bahwa kita bisa melihat dari jumlah wisatawan mancanegaranya yang dimana Danau Toba tidak banyak dikunjungi oleh pengunjung dari negara timur tengah. Jadi *planning* wisata halal itu tidak cocok. Jika kemungkinan 80 persen wisman (wisatawan mancanegara) Danau Toba berasal dari daerah sana, bisa saja Danau Toba menerima penerapan wisata halal. Sedangkan yang banyak berkunjung ke Danau Toba tersebut adalah pengunjung dari Australia, Belanda, dan lain-lain. Masyarakat disana pun sudah nyaman dengan kehidupan sehari-hari mereka seperti itu dan tidak harus menerima wisata halal.

Kemudian, informan 3 menjelaskan bahwa menurutnya yang membuat masyarakat terkhususnya masyarakat di wilayah Danau Toba belum terbuka, karena memang kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat di sekitar Danau Toba. Jadi masyarakat butuh komunikasi yang baik yaitu memberikan solusi (*win win solution*) bagi kedua pihak, baik antara masyarakat dan untuk pemerintah daerah Sumatera Utara (khususnya untuk kemajuan pariwisata di Sumatera Utara itu

sendiri). Jadi, masyarakat harus diberikan sosialisasi secara kontinu (terus menerus), sehingga mereka perlahan-lahan bisa mengerti apa sebenarnya yang diinginkan dan apa sebenarnya tujuan pemerintah untuk mencanangkan wisata halal jika memang benar.

Informan 4 berpendapat yang bahwa hal itu terjadi dikarenakan masih kurangnya pengetahuan akan arti dari wisata halal itu sendiri. Informan 5 menjawab hal ini karena mungkin masyarakat disana merasa takut akan makanan lokal atau kekhasan mereka itu terpendam dan terkecilkan. Padahal maksud Gubernur, itu tidak demikian. Makanan lokal itu tetap ada dibarengi dengan wisata halal (penyediaan makanan halal). Selanjutnya informan 6 menjelaskan, wisatawan melakukan pariwisata dikarenakan setiap objek wisata atau destinasi wisata mempunyai daya tarik tersendiri seperti adat dan budaya sehingga mereka takut lama kelamaan akan kehilangan adat dan budaya asli mereka. Informan 7 menjelaskan masyarakat di wilayah Danau Toba belum terbuka dengan wisata halal ini karena kurangnya sosialisasi tentang wisata halal itu sendiri. Jadi masyarakat menafsirkan sendiri, seperti tidak boleh lagi berjualan babi. Padahal itu sebenarnya budaya.

Menjawab pertanyaan tentang apa upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk meredakan polemik wacana wisata halal di Danau Toba ini, informan 1 menjelaskan bahwa pemerintah sudah meredakannya dengan cara tidak membahas lagi wacana wisata halal ini. Karena seperti yang mereka tau, isu-isu agama di Indonesia sedang panas-panasnya. Jadi lebih baik tidak membahas dulu untuk meredam polemic wacana wisata halal ini. Informan 2 menjelaskan yang bahwa

banyak upaya yang dilakukan. Diantaranya Dinas Pariwisata Sumatera Utara dan Gubernur telah membuat pernyataan bahwasanya mereka tidak pernah mewacanakan wisata halal untuk Danau Toba, dan Dinas Pariwisata di daerah sekitaran Danau Toba pun demikian. Pihak pemerintah menjelaskan jangan sampai masyarakat termakan isu dan terprovokasi.

Informan 3 menjelaskan tentang upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk meredakan polemik ini, Gubernur Sumatera Utara secara langsung sudah menyampaikan bahwa isu tersebut adalah hoaks. Gubernur tidak ingin menghilangkan kebudayaan masyarakat sekitar Danau Toba dengan hadirnya wisata halal. Saya rasa itu cukup untuk meredam isu hoaks yang pada 2019 ramai diperbincangkan masyarakat Sumatera Utara. Informan 4 menjelaskan yang bahwa pemerintah telah memberikan penjelasan tentang polemik wisata halal ini melalui *press conference*. Dan tidak menjadikan danau toba sebagai destinasi wisata halal.

Informan 5 menjawab bahwa beliau tidak tahu jelas upayanya. Namun solusinya, lebih baik pemerintah dan masyarakat (perwakilan) dikumpulkan untuk membicarakan hal tersebut secara baik-baik. Dan dengan keputusan apapun itu, semoga kedua belah pihak menerimanya. Informan 6 menjelaskan tentang hal ini yang bahwa pemerintah sudah melakukan upaya dengan cara memberikan edukasi pariwisata yang dilakukan oleh *stakeholder* pariwisata kepada masyarakat. Dan informan 7 menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan klarifikasi di berbagai media dan memberikan penjelasan lanjut.

Mengenai jika telah melakukan upaya dan akhirnya pemerintah telah mendapatkan dukungan dari masyarakat di wilayah Danau Toba karena sudah paham dan menerima implementasi konsep wisata halal, apakah konsep wisata halal bisa menyukseskan program pemerintah dalam ranah pariwisata dan mendatangkan lebih banyak wisatawan terutama wisatawan muslim, informan 1 berpendapat bahwa menurutnya konsep wisata halal ini bisa sukses dan bisa menarik wisatawan ke Danau Toba. Karena seperti yang kita ketahui wisatawan Danau Toba lebih banyak dari Negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Terutama Malaysia yang didominasi oleh masyarakat beragama islam. Jadi tentunya dengan dibuatnya konsep wisata halal ini, nantinya akan lebih banyak lagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Danau Toba, terutama wisatawan muslim.

Informan 2 menjelaskan yang bahwa Danau Toba memang telah menjadi destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Menurut pandangannya, kita lihat data terlebih dulu bahwasanya wisatawan mana yang paling banyak mengunjungi Danau Toba. Jika kebanyakan dari Negara Eropa, wisata halal ini dinilai kurang tepat. Tapi jika wisatawan banyak dari Negara timur tengah atau Negara yang mayoritasnya muslim, maka konsep ini sangat cocok untuk alasan fasilitas atau kecukupan mereka. Bisa kita lihat di Indonesia yang telah menerapkan wisata halal seperti Lombok dan Aceh dimana kedua daerah ini mayoritas wisatawannya adalah muslim.

Kemudian informan 3 menjelaskan bahwa beliau rasa jika masyarakat di sekitar Danau Toba sudah paham bagaimana konsep wisata halal yang sebenarnya, beliau yakin hal ini dapat menyukseskan program pemerintah untuk memajukan

pariwisata di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba dengan mendatangkan lebih banyak wisatawan muslim. Seperti yang kita ketahui bahwa letak geografi Sumatera Utara ini dekat dengan Malaysia, Singapura, dan bahkan di Sumatera Utara sendiri, jumlah masyarakat muslim banyak. Jadi, dengan isu-isu wisata halal yang ada, masyarakat muslim mungkin lebih banyak tertarik datang ke Danau Toba untuk berwisata.

Selanjutnya, informan 4 hanya menjawab dengan singkat yaitu bisa. Kemudian, informan 5 menjelaskan bahwa hal ini sangat bagus untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Karena apa? Wisatawan tidak merasa bingung (seperti mau makan dimana dan apa). Dan perlu ditekankan, wisata ini bukan hanya untuk wisatawan muslim saja. Mungkin wisatawan nonmuslim pun juga akan banyak berkunjung ke Danau Toba karena masih ada tempat makanan yang sesuai dengan mereka disana. Informan 6 berpendapat bahwa tentu saja konsep pariwisata halal/*halal tourism* dapat sukseskan program pemerintah dalam kepariwisataan yang ada di Sumatera Utara termasuk Danau Toba yang merupakan salah satu destinasi prioritas utama di Indonesia dimana presentasi kedatangan wisatawan yang sering berkunjung ke Danau Toba merupakan wisatawan dari Malaysia dan termasuk wisatawan lokal.

Dan yang terakhir, informan 7 menjawab dengan tegas yaitu tentu saja. Karena sudah ada datanya bahwa wisatawan paling banyak dari Malaysia. Harusnya mereka disediakan tempat ibadah dan mudahnya mencari makanan halal, terutama di

Daerah Dairi. Seharusnya perlu dikembangkan kuliner-kuliner Danau Toba yang tidak mengandung unsur non halal seperti ikan mas arsik, mie gomak, dan lain-lain.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kilas Balik Wisata Halal

Dari pernyataan yang didapatkan dari para responden penelitian, bahwasanya wisata halal merupakan wisata yang berbasis atau berlandaskan islami yang menawarkan kemudahan akses dan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan muslim, seperti tempat ibadah dan sarana konsumsi (tempat makan). Wisata halal ini bukan ajang islamisasi, melainkan hanya sebagai ajang pemenuhan kebutuhan wisatawan muslim dan juga tidak hanya diperuntukkan untuk mereka saja, melainkan untuk semua golongan.

4.2.2 Wacana Implementasi Wisata Halal

Terkait wacana penerapan wisata halal, tidak tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Bisa dilihat disini pada Peraturan Daerah provinsi Sumatera Utara nomor 5 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2025, yang tidak dicanangkan program atau rencana implementasi wisata halal apalagi wisata syariah namun hanya memprioritaskan penyediaan fasilitas umum atau keperluan untuk wisatawan tertentu yang terdapat pada Pasal 41 poin c yang berbunyi “Strategi peningkatan prasarana

umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi: a) penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta, b) penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan, c) penerapan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.”

Jadi, berlandaskan acuan Perda ini, Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah terkait secara implisit tidak menyatakan akan mencanangkan dan memprioritaskan wisata halal ataupun wisata syariah. Namun, hanya ingin menyediakan prasarana umum serta fasilitas penunjang pariwisata untuk memenuhi kebutuhan pariwisata berkebutuhan khusus seperti halnya untuk wisatawan muslim yang tersedianya sarana ibadah dan konsumsi. Sebenarnya jika tidak membericarakan makna yang tersirat dalam tuangan Perda tersebut, hakikat pada poin “c” ini menjurus kepada hakikat wisata halal. Namun disini masyarakat tidak betul memahami dan terlebih dulu paranoid karena tidak tahu hakikat dasar wisata ini.

4.2.3 Pemberitaan Wacana Penerapan Wisata Halal oleh Gubernur Sumatera Utara

Terkait pemberitaan yang membahas wacana pemerintah untuk mencanangkan wisata halal tersebut dipastikan hoaks atau fitnah. Ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Gubernur Sumatera Utara pada pemberitaan yang terpercaya berikut:

Gambar 4.1

Berita Klarifikasi Gubernur Sumatera Utara



Sumber : <https://sumut.inews.id>

Gambar 4.2

Klarifikasi Kominfo terkait Isu Wisata Syariah di Danau Toba



Sumber : <https://www.kominfo.go.id>

Kemudian, penelusuran secara pustaka dan dokumen data juga menemukan fakta dimana yang dikutip dari CNN Indonesia (4/9/2019), Gubernur Sumatera Utara tidak pernah mengatakan akan menerapkan wisata halal atau wisata syariah di Danau Toba. Edy Rahmayadi juga menegaskan bahwa informasi yang dikonsumsi publik tersebut adalah hoaks dan fitnah. Menurutnya, keberagaman masyarakat di Sumatera Utara tidak memungkinkan dirinya untuk melontarkan hal seperti demikian. Dengan kata lain, terdapat kesalahpahaman informasi atas apa yang disampaikan kepada wartawan oleh dirinya seperti yang juga telah dipaparkan oleh para responden penelitian.

Seusai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Danau Toba, Edy Rahmayadi diwawancarai wartawan mengenai apa tindakannya sebagai Gubernur terkait Danau Toba sebagai salahsatu wisata unggulan. Gubernur pun menjawab bahwa pertama perlu diingat wisatawan mana yang paling banyak datang ke Danau Toba. Pada pembicaraan ini dicontohkannya wisatawan Malaysia yang paling banyak datang sebagai turis dan tentu segala kebutuhan mereka harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua mengenai pembangunan infrastruktur wisata. (CNN Indonesia edisi 4/9/2019). Disinilah letak salahnya interpretasi dari pihak wartawan yang bahwa Gubernur tidak pernah mengatakan ingin menerapkan wisata halal apalagi wisata syariah di Danau Toba. Salahnya pengambilan kesimpulan atas pernyataan Gubernur Sumatera Utara disebabkan oleh ketidakpahaman dan tidak berusaha menanyakan atau mendiskusikan lebih jauh sehingga menciptakan spekulasi lain yang merugikan.

4.2.4 Aksi Demonstrasi Penolakan Wisata Halal

Gambar 4.3

Berita Aksi Penolakan Wisata Halal oleh Mahasiswa



Sumber : <http://news.detik.com>

Dengan isu intoleransi yang sempat terjadi, salah informasi yang diberitakan oleh wartawan mengundang reaksi masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman dan mengkaitkannya dengan isu berat sebelah dan menguntungkan sebelah pihak serta ini menjadi cikal bakal terjadinya demonstrasi atau aksi penolakan. Ini semua akibat tak senonohnya media memberitakan hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena media massa merupakan salahsatu faktor yang

mempengaruhi sikap khalayak (Azwar S, 2011:30). Aksi ini memang seharusnya tidak dilakukan karena memang ini hanya merupakan kesalahpahaman dan masyarakat perlu meminta kejelasan secara kepala dingin tanpa arogansi langsung ke pihak pemerintah.

Tetapi, melihat dan menimbang, hal ini wajar dan sah saja dilakukan. Aksi ini secara tidak langsung merupakan aksi audiensi skala besar untuk mendapatkan pemaparan langsung dari pemerintah. Dan aksi ini juga berlandaskan Negara Indonesia adalah Negara demokrasi dan memang demonstrasi adalah bentuk aksi wajar seperti yang tertuang pada Pasal 28 E No 3 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Namun audiensi dan meminta kejelasan secara damai adalah jalan tepat mengingat isu ini patut dimintai keterangan.

Jika melihat hasil penelitian relevan sebelumnya yang dijabarkan, yang menjadi komunikator adalah Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, sementara yang menjadi komunikan terutama adalah masyarakat yang berada di kawasan Danau Toba, yang dalam konteks ini akan terdampak secara langsung apabila kebijakan pencanangan wisata halal bagi kawasan wisata Danau Toba diterapkan. Sementara itu, seorang komunikator yang memiliki tujuan memengaruhi komunikannya, harus menyadari pentingnya kompetensi komunikasi supaya pesan yang disampaikannya bisa mudah diterima (Almonkari and Isotalus 2012; Morreale, Osborn, and Pearson 2000; Verma 2013).

Lebih jauh, penting kiranya memperhatikan dua asumsi retorik yang dikemukakan Aristoteles, yang menyebutkan bahwa komunikator (politik) harus mempertimbangkan 2 hal ketika hendak menyampaikan sebuah gagasan kepada khalayaknya: (1) mengenal atau memahami khalayak dengan baik; dan (2) menggunakan beberapa bukti dalam presentasi. Khalayak sendiri merupakan pusat dari pembicara. Jadi, komunikator harus memikirkan apa saja yang terkait dengan khalayak dan latar belakangnya, meliputi motivasi khalayak, keputusannya, kebiasaannya, ideologinya, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin dan lain sebagainya. Upaya menganalisis khalayak ini juga menjadi amat penting karena khalayak tidak selalu terbuka menerima argumentasi rasional (West and Turner 2017).

Karena di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, pejabat publik (politisi) dituntut memiliki kompetensi dalam komunikasi politik, terutama kemampuan dalam memahami khalayak atau konstituennya. Perbedaan latar belakang khalayak menjadikan kompetensi ini sangat penting sehingga komunikator bisa merancang pesan dengan baik dan terhindar dari salah penafsiran. Selain kemampuan memahami (menganalisis) khalayak, aspek lain yang juga penting ialah memiliki bukti dalam presentasi yang diwakili oleh ethos, pathos, dan logos. Dengan ethos, komunikator bisa menjadi sosok yang kredibel (bisa dipercaya) oleh konstituennya sehingga akan mempermudah penyampaian argumentasi (logos) pada suasana persuasi yang ingin dibangun (pathos). Tanpa kompetensi-kompetensi tersebut, amat mungkin disalahartikan dan berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat

(Tarigan dan Basit, 2020:131).

Wacana wisata halal memang telah menjadi isu polemik dan mendapat banyak penolakan dari kalangan masyarakat pasca terdapat pemberitaan yang tidak terdapat unsur fakta dan realita, namun sebenarnya perlu dipahami bahwa konsep wisata halal sendiri sebenarnya tidak perlu ditakutkan dan bukan penerapan seperti hukum syariah yang ada di beberapa Negara Timur Tengah atau di Aceh. Tetapi konsep wisata mengkampanyekan *muslim and family friendly* yang ramah terhadap pelancong Muslim.

Tujuan dari pembangunan wisata halal ini sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar wisatawan muslim akan tersedianya akomodasi wisata yang sesuai dengan kebutuhan kalangan muslim sendiri. Jadi ini cukup jauh dari hakikat wisata syariah yang justru memang tidak perlu diterapkan di Danau Toba. Wisata halal memang cocok diterapkan jika berlandaskan perkataan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara Ria Novida Telaumbanua yang dikutip dari Kumparan Travel (edisi 3 September 2019), jumlah turis yang berkunjung di Danau Toba mayoritas wisatawan muslim.

Dalam laporan COMCEC 2016 disebutkan beberapa kriteria kebutuhan wisatawan muslim saat melakukan wisata yang disebut dengan *faith based needs*. Kebutuhan tersebut mencakup tersedianya: (1) makanan halal, (2) fasilitas beribadah yang layak, (3) pelayanan saat bulan Ramadhan, (4) toilet yang menyediakan air (*water friendly washrooms*), dan (5) fasilitas rekreasi yang memberikan privasi, dan (6) tidak ada aktivitas non halal.

Di Indonesia sendiri dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tentu hal ini sangat mudah diterapkan. *Muslim and family friendly* ini berarti tersedianya fasilitas yang ramah terhadap wisatawan muslim seperti menyediakan tempat salat, pemisahan dan penandaan antara makanan halal dan haram, pemisahan minuman beralkohol dan lain sebagainya dan hal ini yang menjadi maksud dari pernyataan Gubernur Sumatera Utara untuk mendongkrak jumlah wisatawan. Jadi konsep ini sendiri masih sangat jauh sekali dengan sistem syariah yang diterapkan di beberapa Negara Arab maupun di Aceh. Jika diterapkan penerapan konsep wisata ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaring wisatawan muslim lebih banyak lagi terutama dari negara-negara Timur Tengah yang jumlahnya terlalu signifikan untuk diabaikan.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini hanyalah pemahaman antara istilah implementasi wisata halal atau wisata syariah. Kedua hal ini cukup jelas berbeda. Terkait penyediaan fasilitas untuk wisatawan muslim merupakan bagian dari konsep wisata halal hanya sebagai pemenuhan aspek wisata mereka. Jika penerapan wisata syariah justru tidak sesuai dengan lingkungan masyarakat disana yang mayoritas nonmuslim.

Perlu diketahui, konsep *halal tourism* ini sendiri sudah diterapkan di beberapa negara maju yang bahkan dengan penduduk minoritas muslim. Contohnya Korea Selatan yang bisa menarik sekitar 511.017 wisatawan muslim pada paruh tahun 2019, pada tahun 2018 mendatangkan 970.000 wisatawan muslim dan tahun 2017 di angka 870.000 wisatawan muslim (Yonhap News Agency (15/9/2019) dalam Kompas.com edisi Sabtu 24 Oktober 2020)

Selanjutnya ada Jepang. Disana tepat pada tahun 2016 wisawatan muslim mancanegara yang berkunjung meningkat menjadi 24 juta, jumlah yang jauh di atas target 20 juta wisatawan mancanegara yang ditetapkan oleh pemerintah disana untuk tahun 2020. Kenaikan tren wisatawan muslim dapat dilihat dari data yang dimiliki JNTO. Rata-rata kenaikannya setiap tahun sekitar 20 persen. Bahkan, kenaikan wisatawan muslim dari tahun 2014 s/d 2015 terlihat cukup signifikan di angka 29 persen. Jumlah ini meningkat dikarenakan meningkatnya jumlah wisatawan yang berasal dari negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah lainnya (Travelokezone.com edisi 24/8/2016).

Menurut *Japan National Tourism Organization* (JNTO), angka dalam peningkatan turis dari Indonesia maupun Malaysia ini tidak hanya sekedar persyaratan untuk pengajuan visa yang lebih mudah, namun justru cenderung karena para wisatawan Muslim ini mendapatkan beragam kemudahan dan pelayanan, seperti tersedianya tempat ibadah hingga mudahnya akses mendapatkan rumah makan halal disana.

Kembali lagi ke wacana pengembangan objek wisata Danau Toba memang sangat didukung penuh oleh Pemerintah Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sangat antusias dan percaya diri terhadap Danau Toba dan menyukseskannya untuk menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia dan menarik wisatawan lebih banyak. Hal ini dilakukan agar kembalinya perhatian masyarakat dunia dan nasional akan keasrian Danau Toba dan memperkuat budaya tujuh etnis yang melingkari di danau ini juga akan menjadi perhatian

pihaknya.

Atas tujuan ingin memantapkan program yang telah disusun, pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara seyogyanya mengimplementasikan konsep wisata yang ramah bagi semua kalangan wisatawan dengan tujuan memperkaya varian industri pariwisata dengan menebarkan daya tarik konsep halal dan sejalan dengan menampilkannya secara dinamis. Tujuan lainnya yaitu untuk menciptakan suatu tren baru dalam kehidupan dan masyarakat yang dapat diterima oleh semua kalangan. Konsep wisata ini pun sebenarnya tidak terbatas pada satu golongan saja, melainkan semua golongan. Dan tujuan dari semua ini adalah untuk menghilangkan celah-celah yang tidak diinginkan yang bisa merusak *brand* atau jasa pariwisata.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai opini komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap pemberitaan wacana penerapan wisata halal di objek wisata Danau Toba didapatkan dengan sangat variatif dan presentatif. Para informan menjelaskan pendapat sesuai realita menurut pengetahuan dan pandangan mereka. Adanya pemberitaan terkait wacana penerapan wisata halal di Danau Toba dinyatakan tidak benar dan ada pihak yang mendramatisir. Pihak yang dimaksud adalah wartawan yang salah dalam memberikan persepsi serta menginterpretasikan pernyataan Gubernur Sumatera Utara sehingga menjadi besar dan dipelintir. Kesalahpahaman dari pihak wartawan terjadi karena kurangnya pemahaman dan perlu adanya sosialisasi perbedaan wisata halal dengan wisata syariah yang tentu saja berbeda. Padahal nyatanya wacana ini tidak secara implisit tertuang dalam Perda Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Utara untuk mengimplementasikan wisata halal apalagi berkaitan dengan wisata halal atau syariah di Danau Toba dan akhirnya menimbulkan penolakan atau aksi massa di masyarakat.

Aksi protes atau demonstrasi akibat dari pemberitaan fitnah tersebut terjadi secara wajar dan sebagai bentuk pernyataan sikap masyarakat. Secara tidak langsung

aksi ini merupakan aksi audiensi skala besar dengan pemerintah untuk menemukan kejelasan sehingga masyarakat bisa mengerti maksud dan tujuan pernyataan Gubernur Sumatera Utara. Namun, alangkah lebih baiknya representatif komunitas masyarakat berjumpa langsung dengan pemerintah daerah dan meminta kejelasan secara kepala dingin dan damai agar tidak menjatuhkan citra pemerintah. Pemerintah secara bijak juga harus mengedukasi masyarakat tentang apa yang menjadi ketakutan mereka. Walaupun ingin dicanangkan, wisata halal berbeda dengan wisata syariah yang mungkin bisa menghilangkan budaya dan leluhur mereka. Mereka pun yakin telah memperlakukan wisatawan muslim sebagaimana mestinya.

Terkait polemik yang sempat terjadi, pemerintah terkhususnya Gubernur Sumatera Utara telah memberikan klarifikasi secara terbuka kepada media bahwa berita tersebut didramatisir dan tidak akan ingin membahasnya lagi. Padahal di Indonesia sendiri dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tentu wisata halal ini sangat mudah diterapkan. Wisata halal ini menawarkan kemudahan fasilitas yang ramah terhadap wisatawan muslim seperti tersedianya tempat salat, penyediaan tempat makan dan pemisahan antara makanan halal dan haram, dan hal ini yang menjadi maksud dari pernyataan Gubernur Sumatera Utara untuk mendongkrak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba.

5.2 Saran

Atas dasar keinginan pemerintah untuk menunjang fasilitas serta sarana bagi wisatawan dengan kebutuhan khusus, wisata halal secara tidak langsung telah

menjadi harapannya walaupun masyarakat terlebih dulu paranoid terhadap wisata halal tersebut melalui pemberitaan yang tak paham maksud dan tujuan. Disini peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan wisata dalam memberikan pelayanan dan fasilitas yang prima sangat penting melihat jumlah wisatawan muslim yang berkunjung terlalu signifikan jika diabaikan. Pemahaman hakikat wisata halal dengan wisata syariah perlu menjadi konsentrasi pemerintah dalam hal pemulihan isu polemik ini dan pemerintah setidaknya mendapatkan keterbukaan masyarakat. Kembali lagi, ini semua tak akan terjadi bila pemerintah tidak mengambil langkah sosialisasi nyata untuk melakukan pendekatan dengan setiap elemen masyarakat sehingga nantinya bisa menciptakan satu pemahaman dan sikap untuk memajukan daerah terkhususnya pada bidang pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soejono. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Almonkari, Merja, and Pekka Isotalus. 2012. *Two Perspectives on the Communication Skills of Political Leaders*. *International Journal of Strategic Communication*, 6 (1): 246–267.
- Alo Liliweri, M. 2013. *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Azwar, S. (2011). *Sikap dan Perilaku Dalam: Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Supomo dan Nur Indriantoro, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM.
- Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S., 2015, *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in*, *Journal of Economics, Business and Management*, 3 (7): 277-279.
- CNN Indonesia. 4 September 2019. *Edy Rahmayadi Respons Polemik Wisata Halal di Danau Toba*. Diakses pada 20 Mei 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190904205123-269-427610/edy-rahmayadi-respons-polemik-wisata-halal-di-danau-toba>
- Coombs. (2007). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding*. USA: Sage Publications.
- Crow, G. and Allan, G. 1994. *Community Life: An Introduction to Local Social Relations*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Cruteau, David dan William Hoynes. *Media/Society: Industries, Images, and Audiences*(London: Pine Forge Press, 1997) p. 163
- Cutlip, Centre & Broom. 2006. *Effective Public Relations*. Edisi ke-9. Jakarta: Kencana.
- Damanik, Khairul Ikhwan. 3 September 2019. *Soal Wisata Halal Danau Toba, Gubernur Edy: Ada yang Suka Dramatisir*. Retrieved from Detiknews.com: <https://news.detik.com/berita/d-4692086/soal-wisata-halal-danau-toba-gubernur-edy-ada-yang-suka-dramatisir>
- Deddy Mulyana. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Diyanet Isleri Başkanlığı. (2011). *Helal (The Halal)*. Retrieved from <http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/DiniBilgilerDetay.aspx?ID=1884>.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKis, 2007). hal 87-92.
- Facebook GenPI Sumut. diakses pada 5 Juni 2021, dari: <https://m.facebook.com/genpisumutofficial/>
- Fiske, John. 1990. *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Fiske. *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. (Yogyakarta: Jalasutra, 1990) hal. 239.
- Generasi Pesona Indonesia Sumatera Utara. Diakses pada 24 Mei 2021, dari <https://genpisumut.com>
- Generasi Pesona Indonesia. Diakses pada 23 Mei 2021, dari <https://genpi.id/>
- Generasi Pesona Indonesia. Diakses pada 24 Mei 2021, dari <https://genpi.id/tag/sumatera-utara/>
- Gulen, F. (2011). Helal lokma ve iffetli nesiller (Halal bite and virtuous generations). Retrieved from: http://www.herkul.org/kiriktesti/index.php?view=article&article_id=4597.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Iriantara, Yosol. 2004. *Manajemen Strategis Public Relations*. Jakarta: Ghalia.
- Jaelani, Aan. 2017. *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*. Dalam Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 76237, dimuat 17 Januari 2017.
- Japan National Tourism Organization. (2017). Aktivitas di Jepang. Retrieved Maret 8, 2018, from Japan National Tourism Organization: <https://www.jnto.or.id/aktivitas>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal 250.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Berita. Diakses di kbbi.web.id/berita pada 22 Mei 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Komunikasi. Diakses di kbbi.web.id/komunikasi pada 20 Mei 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Komunitas. Diakses di kbbi.web.id/komunitas pada 22 Mei 2021.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2012). *Kriteria dan Panduan Umum Pariwisata Syariah*.
- Kementerian Ekonomi dan Pariwisata Republik Indonesia. 2012. Undang-undang No 10 Tahun 2009. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Kertajaya, Hermawan. 2008. *Arti Komunitas*. Gramedia Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. P.N. Balai Pustaka. Jakarta.

- Kominfo. (2019). *[HOAKS] Gubernur Sumatera Utara Memutuskan Danau Toba Menjadi Wisata Syariah*. Diakses pada 25 Mei 2021, dari https://kominfo.go.id/content/detail/21420/hoaks-gubernur-sumatera-utara-memutuskan-danau-toba-menjadi-wisata-syariah/0/laporan_isu_hoaks
- Kusumaningrat, Hikmat, dan Purnama Kusumaningrat. 2006. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Menteri Pariwisata Republik Indonesia. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019*. Peraturan Menteri Pariwisata, (hal. 9-10). Jakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Remaja, hal 3.
- Mulayan, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke-18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 5 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2025.
- Poerwandari, E. K. 1998. *Pendekatan Kualitatif Dalam penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Poerwandari, Kristi. 2005. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Fakultas Psikologi UI.
- Purba, Stepanus. 4 September, 2019. *Polemik Wisata Halal di Danau Toba, Gubernur Sumut: Jangan Percaya Isu Hoaks*. Diakses pada 19 Mei 2021, retrieved from iNewsSumut.id: <https://www.google.co.id/amp/s/sumut.inews.id/amp/berita/polemik-wisata-halal-di-danau-toba-gubernur-sumut-jangan-percaya-isu-hoaks>
- Putra, Dedi Kurnia Syah. *Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Budaya dan Politik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hal. 142
- Putri, Tiara. 4 September 2019. *Muncul Usulan Jadikan Danau Toba Wisata Halal, Masyarakat Tolak Keras*. Diakses pada 17 Mei 2021, retrieved from Okezone.com: <https://travel.okezone.com/amp/2019/09/04/406/2100613/muncul-usulan-jadikan-danau-toba-wisata-halal-masyarakat-tolak-keras?page=2>
- Qudsiyah, Nazilatul. (2012). *Dinamika Resiliensi Pada Istri Pertama*. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahayu, Iin Tri, dan Tristiadi Ardi Ardani. *Observasi dan Wawancara*. Edisi pertama. (Malang Banyu media Publising, Anggota IKPI Jatim, 2004.
- Ramadhian, Nabilla. 24 Oktober 2020. *KTO: Wisatawan Muslim Indonesia di Korea Selatan Meningkat*. Diakses pada 25 Mei 2021, dari

- <https://travel.kompas.com/read/2020/10/24/101000427/kto--wisatawan-muslim-indonesia-di-korea-selatan-meningkat?amp=1&page=2>
- Riswandi. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Riyani, Utami Evi. 24 Agustus 2016. *Jumlah Wisatawan Muslim ke Jepang Semakin Banyak*. Diakses pada 24 Mei 2021, dari <https://www.google.co.id/amp/s/travel.okezone.com/amp/2016/08/24/406/1472165/jumlah-wisatawan-muslim-ke-jepang-semakin-banyak>
- Romli, Asep Syamsul M. 2014. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Ruslan, Rosady. 2007. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahida, W., Rahman, S. A., Awang, K., & Man, Y. C. (2011). *The Implementation of Shariah Compliance Concept Hotel: De Palma*. 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences.17, pp. 138-142. Singapore: IACSIT Press.
- Sajogyo. 1977. *Golongan Miskin dan Partisipasinya dalam Pembangunan Desa*. PRISMA, No.3, Maret 1977. Jakarta.
- Sankhyaadi, Aria. 3 September, 2019. *Pro-Kontra Wacana Wisata Halal di Danau Toba*. Retrieved from Kumparan Travel: <https://m.kumparan.com/amp/kumparantravel/.pro-kontra-wacana-wisata-halal-di-danau-toba-1rnEiVwK5lm>
- Sarantakos, S. 1993. *Social Research*. Mac Millan Educational Australia Ltd, Melbourne.
- Sastropoetro, Santoso. 1987. *Pendapat Publik, Pendapat Umum, dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial*. Bandung: Remaja Karya.
- Sastropoetro, Santoso. 1990. *Pendapat Publik, Pendapat Umum, dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shoemaker, Pamela J & Stephen D Reese. *Mediating The Message: Theory of Influences on Mass Media Content 2nd Ed*, (New York: Longman Publisher, 1996) p. 223.
- Sitorus, M. 2008. *Pengaruh Atraksi, Fasilitas dan Aksesibilitas Terhadap Nilai Pelanggan dan Citra Obyek Wisata Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ilmiah Pariwisata, 13 (3), 188-207.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherlan, Ade. 2015. *Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism*. Journal of Tauhidinomics, 1 (1), 61-72.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Susanto, Astrid. 1980. *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Bina Cipta.
- Tarigan, Rose Emmaria, & Abdul Basit. (2020). *Penolakan Publik terhadap Program Wisata Halal Danau Toba*. *Nyimak : Journal of Communication*, 4 (1): 125-134.
- The Oxford Learner's Dictionaries. Community Meaning. Diakses di www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/community pada 22 Mei 2021.
- The Oxford Learner's Dictionaries. News Meaning. Diakses di www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/news pada 22 Mei 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Bab I
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E No 3 tentang Hak Berpendapat.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 No. 9 Tahun 1998 tentang Hak Berpendapat di Muka Umum.
- Vardiansyah, Dani. 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Indeks.
- Wahjoedi, S. 2003. *Alun-alun Tempat Protes Rakyat*. Suara Merdeka (Rabu, 5 Februari 2003). <http://www.suaramerdeka.com/hari-an/0302/05/slo4.htm>. [17/11/08].
- Warsito, Budi. 02 September 2019. *Mahasiswa Pecinta Danau Toba Aksi Tolak Wisata Halal*. Diakses pada 25 Mei 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-4690578/mahasiswa-pecinta-danau-toba-aksi-tolak-wisata-halal>
- Webster New Collegiate Dictionary. Communication Meaning. Diakses di www.merriam-webster.com/dictionary/communication pada 20 Mei 2021.
- Wenger, Etienne C, Mc Dermott, Richard, and Snyder, William C. 2002. *Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge*. Cambridge, USA: Harvard Business School Press.
- West, Richard, and Lynn H. Turner. 2017. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. McGraw-Hill Education.
- Wuryasti, F. (2013 Oktober 30). *Wisata Halal, Konsep Baru Kegiatan Wisata di Indonesia*. Diakses 20 Mei 2021, retrieved from Traveldetik: <https://travel.detik.com>
- Yoeti, Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramita: Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 5
Dokumentasi bersama Ketua Harian
GenPI Sumut, Sdr. Ricky Febriansyah



Gambar 6
Dokumentasi bersama Humas
GenPI Sumut, Sdr. Fit Hartoyo



Gambar 7
Dokumentasi bersama
Ketua Divisi *Creative and Content*
GenPI Sumut, Sdr. Fachri Maulana



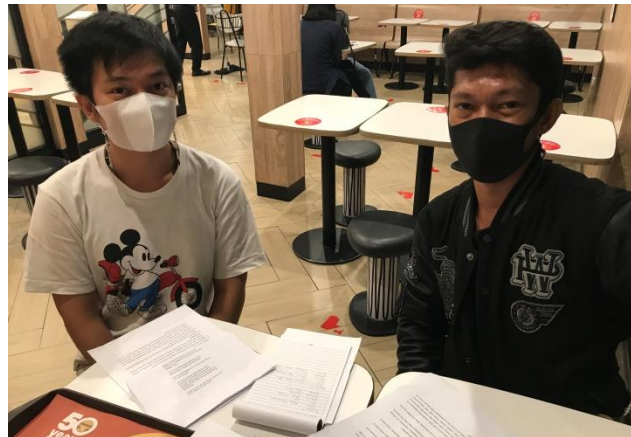
Gambar 8
Dokumentasi bersama Anggota Divisi *Offline*
GenPI Sumut, Sdri. Clara



Gambar 9
Dokumentasi bersama
Anggota Divisi *Offline*
GenPI Sumut, Sdr. Ardiansyah Makrif



Gambar 10
Dokumentasi bersama Anggota
Divisi *Offline* GenPI Sumut,
Sdri. Aurellya Ocx



Gambar 11
Dokumentasi bersama Anggota dan Videografer resmi
GenPI Sumut, Sdr. Junius Ivan Buci

Acc 26
04 2024
Jury

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana penjelasan anda tentang wisata halal?
2. Menurut anda, apakah memang ada wacana dari Gubernur Sumatera Utara seperti yang tertuang dalam PERDA Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk mengimplementasikan wisata halal di Danau Toba?
3. Menurut anda, apakah pemberitaan tentang Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang diisukan mencanangkan wisata halal di Danau Toba tersebut benar adanya? Jika tidak, bagaimana faktanya?
4. Menurut beberapa sumber berita, ada kesalahpahaman informasi antara Gubernur Sumatera Utara dengan wartawan tentang wacana yang dikaitkan dengan wisata halal sehingga timbul *fake news* atau fitnah. Menurut anda, apakah hal ini benar?
5. Menurut anda, apa yang membuat wartawan salah dalam meminterpretasi pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara terkait hal ini?
6. Dari media mana anda dapatkan pemberitaan polemik wacana penerapan wisata halal di Danau Toba sehingga menimbulkan demonstrasi masyarakat?
7. Bagaimana pandangan anda terkait aksi protes atau demonstrasi penolakan wisata halal di Danau Toba tersebut?
8. Menurut anda, apakah aksi demonstrasi tersebut adalah solusi terbaik?
9. Menurut anda, apa yang membuat masyarakat terkhususnya masyarakat di wilayah Danau Toba belum terbuka dan tidak menerima implementasi wisata halal jika memang dicanangkan?
10. Dalam hal ini, apa upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk meredakan polemik wacana wisata halal di Danau Toba?
11. Jika telah melakukan upaya dan akhirnya pemerintah telah mendapatkan dukungan dari masyarakat di wilayah Danau Toba karena sudah paham dan menerima implementasi konsep wisata halal, menurut anda apakah konsep wisata halal bisa menyukseskan program pemerintah dalam ranah pariwisata dan mendatangkan lebih banyak wisatawan terutama wisatawan muslim?

014.17-311



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

jujur, Cerdas & Terpercaya
jawab surat ini agar disebutkan
an langgalnya

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Medan, 30 Desember 2020

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan : Ilmu komunikasi,
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aulia Ramadhana
NPM : 1703110132
Jurusan : Ilmu komunikasi
Tabungan sks : 127 sks, IP Kumulatif 3,16

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Tgl. Persetujuan
1	Opini Masyarakat Kota Medan Terhadap Penolakan Penerapan Wisata Halal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba	4/1-2021
2	Strategi Komunikasi Pemasaran Taman Air Percut dalam Meningkatkan Jumlah dan Minat Pengunjung	
3	Efektifitas Tayangan TEDx Talks dalam Perkembangan Communications Skills Mahasiswa & kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPK tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*).

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon, /

Medan, Jgl. 30 Desember 2020

Ketua,

Murhasanah Nasution

Ace nings
04/01-2021
Dewi
PB. Irwansyari Tanjung

(Aulia Ramadhana)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 5/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : 30 Desember 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **AULIA RAMADHANA**
N P M : 1703110132
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **OPINI KOMUNITAS GENPI SUMATERA UTARA TERHADAP
PEMBERITAAN WACANA PENERAPAN WISATA HALAL DI
OBJEK WISATA DANAU TOBA**

Pembimbing : **Dr. IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 014.17.0311 tahun 2020.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 30 Desember 2021.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 17 Ramadhan 1442 H
29 April 2021 M

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.

SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 26 April 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

Di

Medan

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan kesepakatan dengan Dosen Pembimbing terkait Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing dengan Nomor 5/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AULIA RAMADHANA

NPM : 1703110132

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021

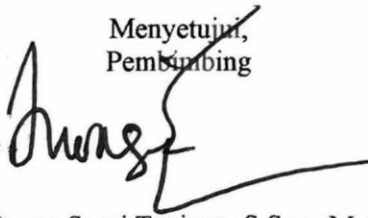
Judul Skripsi Awal : OPINI MASYARAKAT KOTA MEDAN TERHADAP PENOLAKAN
PENERAPAN WISATA HALAL DI DESTINASI PARIWISATA
SUPER PRIORITAS DANAU TOBA

Pembimbing : Dr. IRWAN SYARI TANJUNG, S.Sos., M.AP.

Dengan ini ingin mengubah dan mengajukan judul skripsi ulang dengan judul "**OPINI KOMUNITAS GENPI SUMATERA UTARA TERHADAP PEMBERITAAN WACANA PENERAPAN WISATA HALAL DI OBJEK WISATA DANAU TOBA**"

Demikianlah surat permohonan ini saya buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Irwan Syari Tanjung, S.Sos., M.AP.

Pemohon,



Aulia Ramadhana

Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi



Nurhasanah Nasution, S.Sos., M.I.Kom.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 01 Mei.....2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aulia Ramadhana
N P M : 1703110132
Jurusan : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...5.../SK/II.3/UMSU-03/F/20...21.. tanggal 29 April 2021 ..dengan judul sebagai berikut :

Dpini Komunitas GenPI Sumatera Utara Terhadap Pemberitaan
Wacana Penerapan Wisata Halal di Objek Wisata Danau Toba

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Dr. Irwan Stafri Tanjung, S. Sos., M.A.P.)

Pemohon,

(Aulia Ramadhana)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 575/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 22 Ramadhan 1442 H
04 Mei 2021 M

Kepada Yth : **Koordinator Generasi Pesona Indonesia (GenPi)**
Sumatera Utara
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **AULIA RAMADHANA**
N P M : 1703110132
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **OPINI KOMUNITAS GENPI SUMATERA UTARA TERHADAP
PEMBERITAAN WACANA PENERAPAN WISATA HALAL DI
OBJEK WISATA DANAU TOBA**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 036/GenPI Sumut/I/2021

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor **575/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021** atas hal izin Penelitian Mahasiswa bertanggal 04 Mei 2021, maka Koordinator Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Aulia Ramadhana
NPM : 1703110132
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Benar telah diberikan izin dan mengadakan penelitian di komunitas Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera Utara terhitung dari tanggal 05 s/d 11 Mei 2021 guna untuk syarat penulisan dan penyelesaian skripsi dengan judul “**Opini Komunitas GenPI Sumatera Utara Terhadap Pemberitaan Wacana Penerapan Wisata Halal di Objek Wisata Danau Toba**”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 04 Juni 2021

Koordinator Generasi
Pesona Indonesia
Provinsi Sumatera Utara

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edi Purnomo', is written over the GenPI Sumut logo.

EDI PURNOMO
21-15-001170



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 120/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Jum'at, 05 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang 207-CFISIP UMSU
Pemimpin Seminar : Nurhasanah Nasution, S.Sos., M.I.Kom.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENGUJI	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	ZULFAN EFENDI	1703110033	Dr. PUJI SANTOSO, S.S, M.SP	Dr. LEYLIA KHAIRANI., M.Si.	BUDAYA POP DAN PERSAINGAN IDENTITAS (STUDY DESKRIPTIF PADA KOMUNITAS ANIME ATTACK ON TITAN)
2	ARLITA MAWADDAH NAPITUPULU	1703110026	ELVITA YENNI, SS, M.Hum	SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN TEMPAT WISATA DI KAWASAN KANTOR BUPATI TAPANULI SELATAN
3	DAH AYU RATNA NINGSIH	1703110098	Dr. LEYLIA KHAIRANI., M.Si.	NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom.	TEKNIK KOMUNIKASI ETNIS TIONGHOA DALAM PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA KEHIDUPAN SEHARI-HARI DI KABUPATEN ROKAN HILIR, RIAU
4	AULIA RAMADHANA	1703110132	Dr. LEYLIA KHAIRANI., M.Si.	Dr. IRWAN SYARI TJG, S.Sos., M.AP.	OPINI MASYARAKAT KOTA MEDAN TERHADAP PENOLAKAN PENERAPAN WISATA HALAL DI DESTINASI PARIWISATA SUPER PRIORITAS DANAU TOBA
5	MUHAMMAD AYUB	1703110061	Dr. MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos., M.I.Kom	Dr. IRWAN SYARI TJG, S.Sos., M.AP.	KOMUNIKASI PENYULUHAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DESA KWALA LANGKAT KECAMATAN TANJUNG PURA

Medan, 20 Djumadil Akhir 1442 H

02 Februari 2021 M


Dr. Amin Saleh, S.Sos.,MSP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Aulia Ramadhana
NPM : 1703110132
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Opini Komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap Pemberitaan Wacana Penerapan Wisata Halal di Objek Wisata Danau Toba

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	28/01/21	Bimbingan Perdana Proposal Skripsi	
2	29/01/21	Bimbingan Kedua proposal skripsi serta revisi latar belakang, hipotesis, dan metode penelitian	
3	05/02/21	Bimbingan pasca Seminar proposal dan revisi proposal skripsi	
4	18/02/21	Bimbingan pra penelitian skripsi 1	
5	01/03/21	Bimbingan pra penelitian skripsi 2	
6	20/04/21	Bimbingan pra penelitian lanjutan dan revisi atau perubahan spesifikasi proposal skripsi dan siap penelitian ulang	
7	17/06/21	Bimbingan lanjutan pra final	
8	18/06/21	Bimbingan final	

Medan, ...24... Juni2021...

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.Ps.)

Ketua Jurusan,

(Nurhasah Nasution, S.Sos, M.J. Kom.)

Pembimbing

(Dr. Irwan Syuri Tanjung, S.Sos, M.AP)

AULIA RAMADHANA



Pribadi

- Alamat**
Meukek, Aceh Selatan
- Nomor telepon**
+6282273663027
- Email**
ramalexon.jasper@gmail.com
- Tanggal lahir**
27-12-1998
- Tempat lahir**
Lhok Aman
- Jenis kelamin**
Laki-laki
- LinkedIn**
Aulia Ramadhana

Minat

- Blogging
- Fotografi
- Mentoring

Bahasa

- Bahasa Indonesia ●●●●●
- Bahasa Inggris ●●●●●
- Bahasa Arab ●●●●●

Seorang sarjana Ilmu Komunikasi yang produktif, kompetitif, kontributif, dan disiplin. Aktif dalam keorganisasian dan kompetisi selama kuliah dan berhasil lulus tepat waktu dengan IPK 3,78. Berkemampuan komunikasi yang baik serta bekerja solid dan cepat dalam tim adalah aset saya. Kedepannya ingin menjadi seorang dosen FISIPOL dan berkecimpung dalam dunia pemerintahan untuk memberikan manfaat dan perubahan.

Pendidikan

- Sarjana Ilmu Komunikasi** Sep 2017 - Sep 2021
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Siswa Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)** Jun 2014 - Jun 2017
SMA Negeri Unggul Aceh Selatan, Tapaktuan

Pengalaman Kerja

- Tenaga Pengajar** Okt 2019 - Feb 2021
Accelerated English Centre (AEC), Medan
Menjadi tenaga pengajar Bahasa Inggris yang mengajari lebih dari 50 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat untuk menguasai 4 komponen penting dalam Bahasa Inggris yaitu *writing, reading, listening, dan speaking*.

Pengalaman Organisasi dan Magang

- Ketua Bidang Program & Event Ikatan Agam Inong Aceh Selatan 2016-2018
- Anggota Koordinator PTT pada IMPM Berbagi 2021 di Panti Asuhan Claresta
- Anggota Koordinator PTT pada IMPM Mengajar 2021
- Anggota Koordinator Transportasi pada Pengabdian Masyarakat Akbar IMPM 2021
- Relawan Mengajar di Desa Ndeskati, Karo yang diselenggarakan SGC USU
- Partisipant of International Model United Nation (MUN) Internship 2021

Keahlian

- Public speaking ●●●●●
- Microsoft (word, powerpoint, excel) ●●●●●
- Desain grafis dan photoshop ●●●●●
- Video editing ●●●●●

Pencapaian dan Prestasi

- Medali Emas Penulis Indonesia Muda (PIM) New Magna Olympus se Indonesia 2015
- Delegasi Aceh Keikutsertaan Forum Pelajar Indonesia (FOR) 7 ISYF di Jakarta 2015
- Harapan 1 PASCAL Debating Championship 2015
- Wakil I Agam Duta Wisata Aceh Selatan 2016
- Partisipant of ASEAN Global Youth Learning Exposure in Singapore, Thailand, and Malaysia 2018
- Juara 1 Prosesi Adat Peragaan Busana Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) VII 2018
- Finalist English Debate Competition 61th Milad UMSU 2018
- Juara 1 Speech Contest IMM Vaganza 2018
- Peserta Bersertifikat di 35+ Seminar/Webinar Nasional dan Internasional